



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK #bangga
berorientasi pelayanan akuntabel kompeten
harmonis loyal adaptif kolaboratif
#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JLN. PEMBANGUNAN NO. 21 PADANG HARAPAN

BENGKULU 38225

TELP. (0736) 22231 FAX : (0736) 21585

email : pt-bengkulu@yahoo.com



**ZONA
INTEGRITAS**



<https://www.pt-bengkulu.go.id/>



Pengadilantinggibengkulu



Pengadilan Tinggi Bengkulu



085381759786



Sekapur Sirih

Dengan berakhirnya tahun 2025 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun 2025. Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengadilan Tinggi Bengkulu menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Secara keseluruhan, Laporan Kegiatan Tahun 2025 ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu dan 9 (sembilan) Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang selaras, dengan target kinerja yang telah ditetapkan, serta di harapkan tercapainya peningkatan pelayanan kinerja dan pelayanan publik, untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Bengkulu dan 9 (sembilan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas segala dedikasi dan komitmen dari segenap hakim dan aparatur Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang telah mampu menjaga integritas, dan memberikan kinerja dan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat/pencari keadilan.

Selanjutnya, Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, demi peningkatan kinerja dan pelayanan publik oleh pengadilan tinngi bengkulu dan pengadilan negeri di wilayah hukum pt bengkulu di tahun berikutnya.



Bengkulu, 30 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.



**ZONA
INTEGRITAS**





TENTANG PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pada tanggal 20 Desember 1982 berdasarkan Undang Undang nomor 15 Tahun 1982, Pengadilan Tinggi Bengkulu resmi berdiri yang di resmikan oleh Menteri Kehakiman RI c.q Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum.

Gedung Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terletak di jalan Pembangunan Padang Harapan ini dibangun berdasarkan DIPA Pusat Tahun Anggaran 1980-1981 Nomor 41/XIII/3/1980 tanggal 12 Maret 1980. Gedung Pengadilan Tinggi yang dibangun di atas tanah seluas 10.000 M² terdiri dari dua lantai dengan luas bangunan seluruhnya 1.900 M² dan diresmikan pemakaiannya pada awal berdirinya tanggal 05 Mei 1983 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum yang disaksikan sejumlah Hakim Agung. Pada awal berdirinya Pengadilan Tinggi Bengkulu di Ketuai oleh Bapak Pitojo, S.H., dan Wakil Ketua adalah Bapak Mahyudin Yacob, S.H., dan Bapak Zainuphin Athman, S.H., sebagai Panitera Kepala.

Pengadilan Tinggi Bengkulu pada saat berdiri terdiri dari 4 (empat) Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Curup, Pengadilan Negeri Manna dan Pengadilan Argamakmur.. Seiring dengan adanya otonomi daerah dan pemekaran wilayah kabupaten, pada saat ini wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu menjadi 9 (sembilan) wilayah, yang terdiri dari:

01 Pengadilan Negeri Bengkulu
Kelas IA

02 Pengadilan Negeri Curup
Kelas IB

03 Pengadilan Negeri Manna
Kelas II

04 Pengadilan Negeri Argamakmur
Kelas II

05 Pengadilan Negeri Bintuhan
Kelas II

06 Pengadilan Negeri Tais
Kelas II

07 Pengadilan Negeri Tubei
Kelas II

08 Pengadilan Negeri Kepahiang
Kelas II

09 Pengadilan Negeri Mukomuko
Kelas II



Visi

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung”

Misi

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu, mengacu pada Misi Mahkamah Agung RI, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Motto

Motto Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah “UNGGUL”

Tujuh Nilai Utama

1. Kemandirian.
2. Integritas dan Kejujuran.
3. Akuntabilitas.
4. Responsibilitas.
5. Keterbukaan.
6. Ketidakberpihakan
7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.



PROFIL PIMPINAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU



Nama : Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

NIP : 196005031988041001

TTL : Rapau Prapat, 03 Mei 1960

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

Pangkat : Pembina Utama (IV/e)

Pendidikan : S2 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

RIWAYAT JABATAN

NO	TANGGAL	JABATAN
1.	05 Juni 2025	Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
2.	09 Januari 2025	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
3.	22 Juli 2024	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
4.	22 September 2023	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau
5.	27 Mei 2022	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
6.	11 Maret 2020	Hakim Tinggi Pengadilan Negeri Medan
7.	04 September 2018	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
8.	03 April 2017	Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
9.	22 April 2016	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang
10.	22 Desember 2014	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
11.	18 November 2013	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang
12.	07 Januari 2013	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bandung
13.	05 Oktober 2009	Ketua Pengadilan Negeri Malinau
14.	03 Juli 2009	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau
15.	26 Juli 2007	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan
16.	28 Mei 2001	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Depansar
17.	03 Februari 1997	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rantau Prapat
18.	02 Maret 1992	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
19.	01 Mei 1989	Staf Pengadilan Negeri Jakarta Utara
20.	01 April 1988	Staf Pengadilan Negeri Jakarta Utara



PROFIL HAKIM TINGGI



Nama : MERRYWATI TB, S.H., M.H.
NIP : 195912051986122001
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum

Nama : SURUNG SIMANJUNTAK, S.H. M.Hum.
NIP : 196108221988031002
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum



Nama : H. SUMEDI, S.H., M.H.
NIP : 196211161992121001
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum



PROFIL HAKIM TINGGI



Nama : Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.
NIP : 196606181992121001
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan : S3

Nama : R. AZHARYADI. PRIAKUSUMAH, S.H., M.H.
NIP : 196501011992121001
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum



Nama : DUTA BASKARA, S.H., M.H.
NIP : 196404211991031004
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum



PROFIL HAKIM TINGGI



Nama : H. SAHLAN EFENDI, S.H., M.H.
NIP : 196504141993031006
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum

Nama : Hj. NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.
NIP : 196711261992122001
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum



Nama : JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.
NIP : 196507131992121001
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum



PROFIL HAKIM TINGGI



Nama : RADEN HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.
NIP : 196905241996031003
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum

Nama : SARAH LOUIS SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
NIP : 196503271992122001
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum



Nama : ARMAN SURYA PUTRA, S.H., M.H.
NIP : 197411181999031001
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum



PROFIL HAKIM TINGGI



Nama : NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.
NIP : 196607241994032005
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum

Nama : AZHARI, S.H., M.H.
NIP : 196903021990031003
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum



Nama : MUKHLIS, S.H.
NIP : 196812311995031013
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
erorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
armonisoyaladaptilkolaboratif
melayani
bangsa

PROFIL HAKIM TINGGI



Nama : SARUDI, S.H.
NIP : 196705091996031004
Jabatan : Hakim Tinggi PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum



ZONA
INTEGRITAS





PROFIL HAKIM AD HOC TIPIKOR



Nama : Drs. H. ERWIN WIDANARKO, S.H., S.AP., M.Pd.
NIP : 196401141987031003
Jabatan : Hakim Ad Hoc Tipikor PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum

Nama : SAMSUL HADI, S.H., M.Sc.
NIP : 195302102011000029
Jabatan : Hakim Ad Hoc Tipikor PT Bengkulu
Pangkat : Tanpa Golongan (-)
Pendidikan : S2



Nama : BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, S.H., M.H.
NIP : 19600628202003029
Jabatan : Hakim Ad Hoc Tipikor PT Bengkulu
Pangkat : Tanpa Golongan (-)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum



PROFIL HAKIM YUSTISIAL



Nama : BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.
NIP : 196001121986121001
Jabatan : Hakim Tinggi Yustisial PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum

Nama : RIO DESTRAO, S.H., M.H.
NIP : 197712112002121004
Jabatan : Hakim Yustisial PT Bengkulu
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum



Nama : Dr. TETTY SISKHA, S.H., M.H.
NIP : 198204262008052001
Jabatan : Hakim Yustisial PT Bengkulu
Pangkat : Pembina (IV/a)
Pendidikan : S3



PROFIL PIMPINAN PANITERA PENGADILAN TINGGI BENGKULU



Nama : M. TEGUH, S.E., SH., M.H.

NIP : 196605221989031004

TTL : Palembang, 22 Mei 1966

Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

Pendidikan : S2 Ilmu Hukum Universitas Batam

RIWAYAT JABATAN

NO	TANGGAL	JABATAN
1.	26 Juni 2025	Panitera Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu
2.	22 Desember 2023	Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palembang
3.	14 Februari 2022	Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padang
4.	21 Juni 2021	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
5.	24 Maret 2020	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
6.	21 Agustus 2018	Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Gresik
7.	09 Februari 2018	Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungailiat
8.	09 Juni 2016	Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sampit
9.	07 Desember 2015	Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu
10.	10 November 2014	Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam
11.	13 Mei 2011	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Batam
12.	01 Oktober 2004	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang
13.	01 Juni 1990	Staf Instansi Luar
14.	01 Maret 1989	Staf Instansi Luar





PROFIL PIMPINAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BENGKULU



Nama : H. NURSANI, S.H.

NIP : 196606101991031005

TTL : Malang, 10 Juni 1966

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

Pendidikan : S1 Ilmu Hukum

RIWAYAT JABATAN

NO	TANGGAL	JABATAN
1.	30 Januari 2023	Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu
2.	07 September 2020	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
3.	02 Oktober 2018	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
4.	23 Agustus 2016	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang
5.	31 Desember 2015	Kepala Bagian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
6.	20 Januari 2014	Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
7.	01 Juli 1992	Staf Mahkamah Agung
8.	01 Maret 1991	Staf Mahkamah Agung



PERISTIWA PENTING TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI BENGKULU



PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN BERSAMA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2025

Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 oleh Pimpinan, Seluruh Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Pelaksana Pengadilan Tinggi Bengkulu yang bertempat di Ruang Soebekti Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 02 Januari 2025



PERTEMUAN RUTIN DAN SARASEHAN INTERAKTIF (PERISAI) EPISODE 3 OLEH DIRJEN BADILUM

Pimpinan dan Para Hakim Tinggi mengikuti Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif (Perisai) Episode 3 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan bertemakan tentang "Kinerja Berkualitas dengan Integritas" pada tanggal 20 Januari 2025. Perisai Badilum dilaksanakan untuk meningkatkan budaya berdiskusi, kinerja berkualitas, integritas, permasalahan teknis dilapangan dan mempererat hubungan antar aparatur peradilan di seluruh Indonesia.



SOSIALISASI KUHP, E-COURT DAN E-LITIGASI SERTA ADMINISTRASI PERKARA DAN SIDANG ELEKTRONIK OLEH KETUA PT BENGKULU

Tanggal 03 Februari 2025 Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. menyampaikan sosialisasi mengenai KUHP, e-Court, dan e-Litigasi serta Administrasi Perkara dan Sidang Elektronik kepada para Advokat dan Tenaga Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan harapan hukum di Indonesia akan menjadi lebih ditegakkan dengan baik.



PERISTIWA PENTING TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI BENGKULU



SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. menghadiri kegiatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Februari 2025. sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya sebagai Lembaga Yudikatif.



SOSIALISASI ASPEK KRUSIAL, IMPLEMENTATIF DAN KEBARUAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DARI PERSPEKTIF HAKIM OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pada Tanggal 12 Maret 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Tais menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang bertema "Aspek Krusial, Implementatif dan Kebaruan UU Nomor 1 Tahun 2023 dari Perspektif Hakim". Dari sosialisasi tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu menyampaikan betapa pentingnya bagi kita semua, terkhusus Warga Peradilan untuk memahami UU Nomor 1 Tahun 2023.



PENYAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU BAPAK Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. OLEH KELUARGA BESAR PT BENGKULU

Rabu, 11 Juni 2025 Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bengkulu menyambut kedatangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Drs. Arifin, S.H., M.Hum, pasca Pelantikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. pada tanggal 05 Juni 2025 di Jakarta, Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia.





PERISTIWA PENTING TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI BENGKULU



PELAKSANAAN SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) OLEH DITJEN BADILUM DI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Ditjen Badilum melaksanakan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 19 Juni 2025. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Drs. Arifin, S.H., M.Hum. membuka pelaksanaan Asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) bersama kepala Subdirektorat Data dan Informasi Ditjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Saenal Akbar, S.H., M.H.



KUNJUNGAN KERJA WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK BIDANG NON YUDISIAL INDONESIA YM H. SUHARTO, S.H., M.Hum

Kunjungan Kerja Yang Mulai H. Suharto, S.H., M.Hum Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Republik Indonesia ke Pengadilan Tinggi Bengkulu yang disambut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Drs. Arifin, S.H., M.Hum beserta Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Tanggal 24 Juni 2025.



RAPAT PERSIAPAN EVALUASI DOKUMEN USULAN PREDIKAT WBK PENGADILAN TINGGI BENGKULU DENGAN DITJEN BADILUM

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu Calon Unit Kerja yang diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas Koprusi (WBK) mengikuti rapat seara daring dengan Ditjen Badilum yang bertujuan untuk persiapan evaluasi dokumen usulan predika WBK pada tanggal 25 Juni 2025





PERISTIWA PENTING TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI BENGKULU



SOSIALISASI SK KMA NO. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU SECARA DARING

Pada tanggal 10 Juli 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu melaksanakan Sosialisasi SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Drs. Arifin, S.H., M.Hum. yang didampingi oleh Bapak Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H. sebagai Narasumber pada sosialisasi tersebut.



REKONSILIASI DATA ASSET DAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KOORDINATOR WILAYAH BENGKULU

Pengadilan Tinggi Bengkulu bersama satuan kerja di wilayah hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Data Aset dan Keuangan Ditjen Badan Peradilan Umum yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Koordinator Wilayah 03 pada tanggal 17 Juli 2025.



UPACARA MEMPERINGATI DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-80 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pengadilan Tinggi Bengkulu melaksanakan upacara memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025 untuk mengenang jasa para Pahlawan Kemerdekaan yang telah memberikan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia.





PERISTIWA PENTING TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI BENGKULU



UPACARA MEMPERINGATI DIRGAHAYU MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KE-80 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pada tanggal 19 Agustus 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu melaksanakan upacara memperingati Dirgahayu Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-80 yang dipimpin langsung oleh KPT Bengkulu Bapak Drs. Arifin, S.H., M.Hum. yang diikuti seluruh Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bengkulu.



UPACARA MEMPERINGATI HARI KESAKTIAN PANCASILA TANGGAL 01 OKTOBER 2025

KPT Bengkulu Bapak Drs. Arifin, S.H., M.Hum. memimpin langsung upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 01 Oktober 2025 di Pengadilan Tinggi Bengkulu.



UPACARA MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA TANGGAL 28 OKTOBER 2025

Pada tanggal 28 Oktober 2025 Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Drs. Arifin, S.H., M.Hum. memimpin langsung upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda di Pengadilan Tinggi Bengkulu.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
erorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
armonisoyal adaptifkolaboratif
melayani bangsa

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU DAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Menerima Penghargaan sebagai Peraih Capaian Nilai Tertinggi
Pada Penilaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Perkara Tahun 2025
untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan IA
oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal
03 Desember 2025.



ZONA
INTEGRITAS





PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU DAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2025



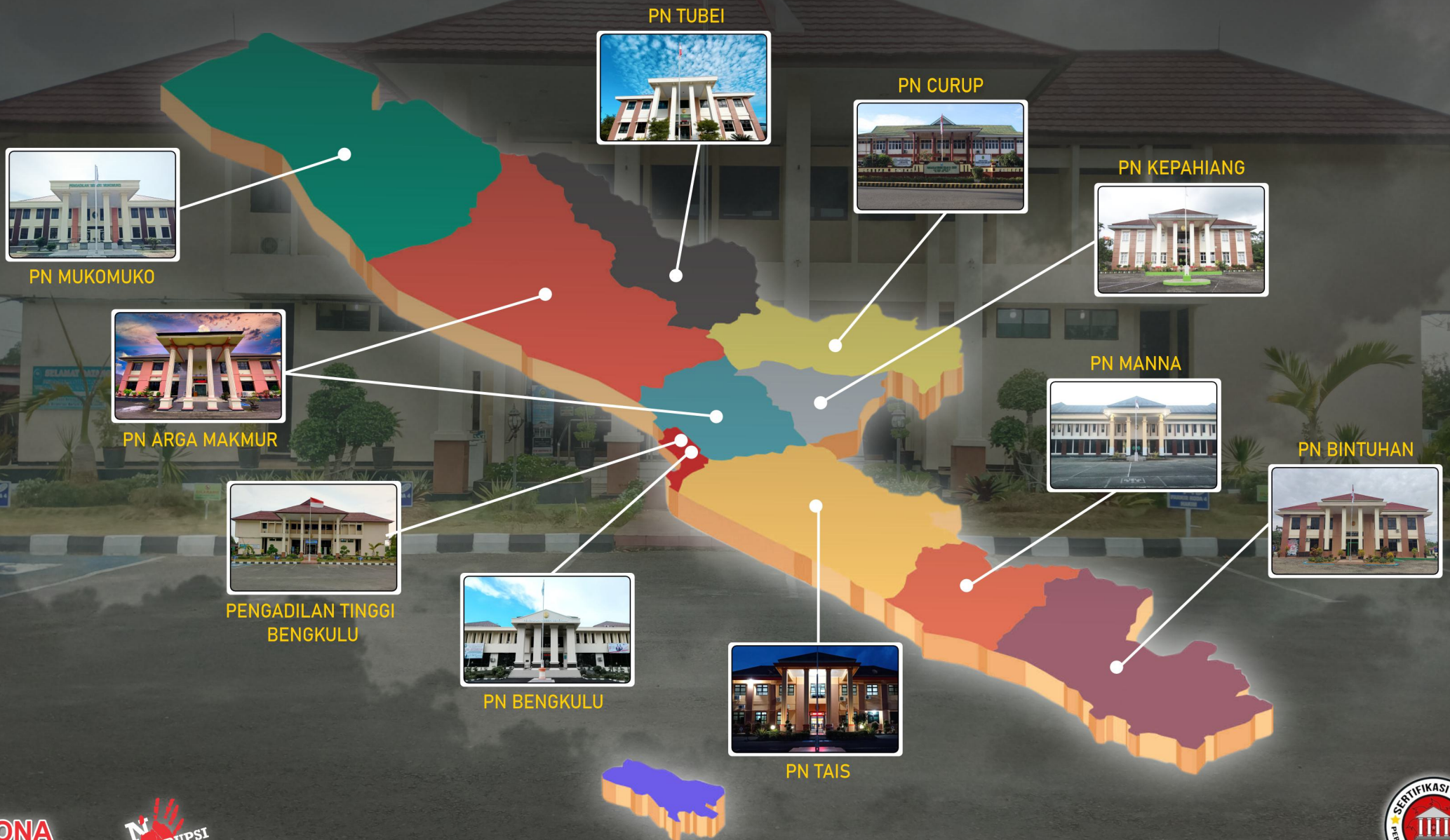
PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

Menerima Penghargaan kategori Satker yang Berhasil
Transaksi Digipaysatu Periode Semester II Tahun 2025
oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu





PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
SEKAPUR SIRIH	2
TENTANG PENGADILAN TINGGI BENGKULU	3
VISI, MISI, MOTTO, DELAPAN NILAI UTAMA	4
PROFIL PIMPINAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU	5
PROFIL HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI BENGKULU	6
PROFIL HAKIM TINGGI AD HOC TIPIKOR PENGADILAN TINGGI BENGKULU	12
PROFIL HAKIM YUSTISIAL PENGADILAN TINGGI BENGKULU	13
PROFIL PIMPINAN PANITERA PENGADILAN TINGGI BENGKULU	14
PROFIL PIMPINAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BENGKULU	15
PERISTIWA PENTING TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI BENGKULU	16
PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI BENGKULU	21
PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU	23
DAFTAR ISI	24
DAFTAR TABEL	26
DAFTAR GAMBAR	27
 BAB I PENDAHULUAN	 29
A. KEBIJAKAN UMUM	29
B. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN TINGGI BENGKULU	30
C. BUDAYA KERJA	31
D. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	32
E. STRUKTUR ORGANISASI	33
 BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI	 36
A. KEADAAN PERKARA	36
1. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA	36
2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING	43
3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI	44
4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI	45
B. PENYELESAIAN PERKARA	46
1. PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU	46
2. PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI	47
3. PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF	49
4. PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	49
5. PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI	50
6. PERKARA PERDATA YANG MENGGUNAKAN E-COURT	50
7. PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)	51
8. LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)	52
C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKAT ISO DIPENGADILAN)	52
1. POSBAKUM (SATKER YANG MENDAPATKAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN)	52

2. SIDANG KELILING ATAU PELAYANAN TERPADU	53
3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)	54
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	56
A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA	56
1. SUMBER DAYA MANUSIA DIPENGADILAN TINGGI BENGKULU	56
2. SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU	59
3. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK GOLONGAN	60
4. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN	60
5. PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA	61
B. PROMOSI DAN MUTASI	61
C. PENSIUN	63
D. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)	64
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	67
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	67
1. REALISASI DIPA 01	67
2. REALISASI DIPA 03	68
3. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	69
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	69
1. TANAH	69
2. TANAH DAN GEDUNG	70
3. KENDARAAN DINAS	73
4. MESIN TIK	77
5. MESIN NON TIK	75
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	75
1. IMPLEMENTASI E-COURT	75
2. IMPLEMENTASI SIPP	76
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	78
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	78
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	78
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK	79
BAB VI PENGAWASAN	82
A. INTERNAL	82
1. PENGAWASAN DAERAH	82
2. PENGAWASAN BIDANG	83
3. PENANGANAN PENGADUAN	85
B. EVALUASI	85
BAB VII PENUTUP	88
A. KESIMPULAN	88
B. REKOMENDASI	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu	36
Tabel 2.	Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Curup	37
Tabel 3.	Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Manna	37
Tabel 4.	Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Argamakmur	38
Tabel 5.	Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan	39
Tabel 6.	Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tais	40
Tabel 7.	Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tubei	41
Tabel 8.	Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang	41
Tabel 9.	Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Mukomuko	42
Tabel 10.	Keadaan Perkara Tingkat Banding	43
Tabel 11.	Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	44
Tabel 12.	Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	45
Tabel 13.	Jumlah Perkara Tingkat Banding Yang Diputus Tepat Waktu	46
Tabel 14.	Jumlah Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu	46
Tabel 15.	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK	47
Tabel 16.	Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restoratif	49
Tabel 17.	Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi	49
Tabel 18.	Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	50
Tabel 19.	Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court	51
Tabel 20.	Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	51
Tabel 21.	Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Elektronik (e-Berpadu)	52
Tabel 22.	Poskabum Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	52
Tabel 23.	Sidang Keliling Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	53
Tabel 24.	Perkara Prodeo Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	54
Tabel 25.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025	56
Tabel 26.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025	59
Tabel 27.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Golongan	60
Tabel 28.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Pendidikan	60
Tabel 29.	Penghargaan Satya Lencana	61
Tabel 30.	Mutasi Masuk Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025	61
Tabel 31.	Mutasi Keluar Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025	62
Tabel 32.	Promosi dan Mutasi Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025	62
Tabel 33.	Pensiun di Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025	64
Tabel 34.	Pensiun di Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025	64
Tabel 35.	Jumlah Mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis	65
Tabel 36.	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025	67
Tabel 37.	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2025	68
Tabel 38.	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025	69
Tabel 39.	Daftar Tanah Tahun 2025	69
Tabel 40.	Daftar PSP Tanah dan Gedung Tahun 2025	70
Tabel 41.	Daftar PSP Kendaraan Dinas Tahun 2025	73
Tabel 42.	Daftar PSP Mesin TIK Tahun 2025	74
Tabel 43.	Daftar PSP Mesin Non TIK Tahun 2025	75
Tabel 44.	Implementasi E-Court Tahun 2025	75
Tabel 45.	Implementasi Penilaian SIPP Tahun 2025	76
Tabel 46.	Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025	78
Tabel 47.	Hasil Penilaian Lomba PTSP Dirjen Badilum Tahun 2025	79
Tabel 48.	Inovasi Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025	79
Tabel 49.	Pengawasan Derah Tahun 2025	83
Tabel 50.	Penanganan Pengaduan Tahun 2025	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu	33
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	34
Gambar 3. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu	36
Gambar 4. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Curup	37
Gambar 5. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Manna	38
Gambar 6. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Argamakmur	39
Gambar 7. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan	40
Gambar 8. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Tais	40
Gambar 9. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Tubei	41
Gambar 10. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang	42
Gambar 11. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Mukomuko	43
Gambar 12. Grafik Kinerja Perkara di Tingkat Banding	43



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani bangsa



BAB I PENDAHULUAN



ZONA
INTEGRITAS **RUPI**



BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM

Sebagai bagian integral dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan dan membina 9 (sembilan) Pengadilan Negeri yang berada di wilayah yurisdiksinya. Pengadilan-Pengadilan tersebut meliputi:

1. Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA.
2. Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.
3. Pengadilan Negeri Manna Kelas II.
4. Pengadilan Negeri Argamakmur Kelas II.
5. Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II.
6. Pengadilan Negeri Tais Kelas II.
7. Pengadilan Negeri Tubei Kelas II.
8. Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II.
9. Pengadilan Negeri Mukomuko Kelas II.



Dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan kebijakan umum yang berfokus pada penguatan kualitas layanan peradilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan integritas aparatur peradilan. Kebijakan umum tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan optimalisasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi, antara lain melalui pemanfaatan aplikasi e-Court dalam mendukung pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara, serta penyampaian pemberitahuan kepada para pihak secara efisien dan transparan. Selain itu, penerapan aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) terus diperkuat guna mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang terintegrasi, cepat, dan akuntabel. Optimalisasi kedua aplikasi tersebut diarahkan untuk mempercepat proses administrasi perkara, mengurangi birokrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.



Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan, Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Tahun 2025 melanjutkan komitmen dalam penerapan AMPUH v (Akreditasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) sebagai instrumen penjaminan mutu peradilan yang berkelanjutan. Capaian predikat unggul yang telah diraih pada periode sebelumnya menjadi landasan evaluatif untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan peradilan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada

kepuasan pencari keadilan. Di samping itu, kebijakan umum Tahun 2025 juga diarahkan pada penguatan pelaksanaan Zona Integritas (ZI) sebagai bagian dari reformasi birokrasi peradilan. Pengadilan Tinggi Bengkulu secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja di bawahnya dalam rangka pemantapan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kebijakan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan penyelenggaraan peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

B. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk mewujudkan visi serta arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Bengkulu berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum serta terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan. Pada Tahun 2025, Kebijakan Mutu Pengadilan Tinggi Bengkulu diarahkan pada penguatan sistem penjaminan mutu peradilan secara berkelanjutan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan. Kebijakan ini dilandaskan pada prinsip kemandirian, integritas, persamaan perlakuan di hadapan hukum, serta penjagaan kewibawaan dan kehormatan lembaga peradilan dalam setiap aspek pelayanan hukum.

Kebijakan mutu tersebut diwujudkan melalui penerapan dan pengembangan sistem manajemen mutu peradilan yang terintegrasi dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Sistem manajemen mutu ini diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan peradilan, baik administrasi maupun yudisial, dilaksanakan secara terencana, terukur, dan konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi berkala dan tindak lanjut atas hasil pengawasan, Pengadilan Tinggi Bengkulu berupaya meningkatkan efisiensi kerja, meminimalkan kesalahan, serta menjamin keseragaman kualitas layanan di seluruh satuan kerja di bawah yurisdiksinya. Selain penguatan sistem manajemen mutu, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia sebagai pilar utama kebijakan mutu. Pengembangan ini dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, peningkatan kapasitas teknis dan manajerial, serta penguatan penguasaan teknologi informasi. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk aparatur peradilan yang kompeten, berintegritas, dan memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan peradilan yang responsif, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan sistem peradilan modern.



Pada aspek pelayanan dan penanganan perkara, kebijakan mutu Tahun 2025 menegaskan komitmen Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, dan berbiaya ringan, sebagaimana prinsip peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyelenggaraan pelayanan peradilan

diarahkan tidak hanya pada percepatan penyelesaian perkara, tetapi juga pada peningkatan kualitas proses dan putusan, kepastian hukum, serta keadilan substantif yang dapat dirasakan oleh para pencari keadilan. Selanjutnya, kebijakan mutu juga diarahkan pada penguatan keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik. Pengadilan Tinggi Bengkulu berkomitmen untuk menyediakan informasi peradilan yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ramah, nondiskriminatif, dan berorientasi pada kebutuhan pencari keadilan. Melalui kebijakan ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terus ditingkatkan seiring dengan terwujudnya peradilan yang bersih, profesional, dan berwibawa.

C. BUDAYA KERJA



Budaya kerja merupakan landasan nilai dan pedoman perilaku aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan peradilan. Pengadilan Tinggi Bengkulu menempatkan budaya kerja sebagai elemen strategis dalam mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan pencari keadilan. Pada Tahun 2025, budaya kerja diarahkan untuk memperkuat sikap, etika, dan kinerja aparatur peradilan agar selaras dengan tuntutan peradilan modern,

transparan, dan akuntabel. Budaya kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Nilai-nilai budaya kerja tersebut diinternalisasikan dan diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh aparatur peradilan dalam setiap proses pelayanan dan penyelenggaraan tugas peradilan, baik yang bersifat administrasi maupun yudisial.

1. Integritas dan Keadilan dalam Pelayanan Peradilan

Integritas dan keadilan merupakan nilai utama yang mendasari budaya kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu. Integritas diwujudkan melalui sikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, sedangkan keadilan tercermin dalam pemberian pelayanan hukum yang setara dan nondiskriminatif kepada seluruh pencari keadilan. Setiap aparatur peradilan berkewajiban menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan. Melalui budaya kerja yang berlandaskan integritas dan keadilan, Pengadilan Tinggi Bengkulu berupaya memastikan bahwa setiap proses peradilan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak tertentu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terjaga dan ditingkatkan.

2. Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Peradilan

Profesionalisme dan akuntabilitas menjadi nilai budaya kerja yang menuntut aparatur peradilan untuk melaksanakan tugas secara kompeten, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Profesionalisme diwujudkan melalui penguasaan kompetensi teknis dan administratif, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta kemampuan bekerja secara efektif dan efisien. Akuntabilitas mengharuskan setiap aparatur peradilan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugas. Seluruh proses kerja harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diawasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sebagai bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berwibawa.

3. Pelayanan Prima yang Humanis dan Responsif

Budaya kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu juga diarahkan pada terwujudnya pelayanan peradilan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan prima dimaknai sebagai pelayanan yang ramah, santun, cepat, dan memberikan kepastian informasi kepada pencari keadilan, tanpa mengabaikan ketelitian dan ketepatan prosedur hukum. Aparatur peradilan dituntut untuk menghormati martabat setiap individu, berkomunikasi secara baik, serta tanggap terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks peradilan modern, pelayanan prima juga diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kemudahan akses dan kualitas layanan peradilan.

Penerapan budaya kerja yang berlandaskan integritas dan keadilan, profesionalisme dan akuntabilitas, serta pelayanan prima yang humanis dan responsif, Pengadilan Tinggi Bengkulu berkomitmen untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif, beretika, dan berorientasi pada pelayanan publik. Budaya kerja ini diharapkan menjadi penggerak utama dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan serta mendukung terwujudnya peradilan yang modern, terpercaya, dan berwibawa sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

D. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terukur, dan berkesinambungan. RENSTRA disusun sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tahun 2025 merupakan periode awal pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu periode 2025-2029. Oleh karena itu, penyusunan dan implementasi RENSTRA pada tahap ini diarahkan untuk memperkuat fondasi kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, serta menjawab tantangan dinamika lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. RENSTRA disusun berdasarkan kondisi riil yang dihadapi Pengadilan Tinggi Bengkulu serta mempertimbangkan perkembangan sistem peradilan nasional dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu diselaraskan dengan Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035, hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan. Penyelarasan ini dimaksudkan agar seluruh arah kebijakan dan program strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu berkontribusi secara nyata terhadap terwujudnya visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Tujuan strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam RENSTRA periode 2025-2029 berorientasi pada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan melalui penyelenggaraan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kepuasan pencari keadilan tersebut diwujudkan melalui proses peradilan yang sederhana, cepat, tepat waktu, dan berbiaya ringan, tanpa mengesampingkan kualitas putusan dan kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, RENSTRA Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan arah kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan, melalui penguatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan, peningkatan kualitas putusan, serta penerapan standar pelayanan peradilan yang konsisten.
2. Optimalisasi pengelolaan dan penyelesaian perkara, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses peradilan.
3. Penguatan integritas dan pengawasan internal, dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik, serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi, untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta memastikan akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat bagi pencari keadilan.

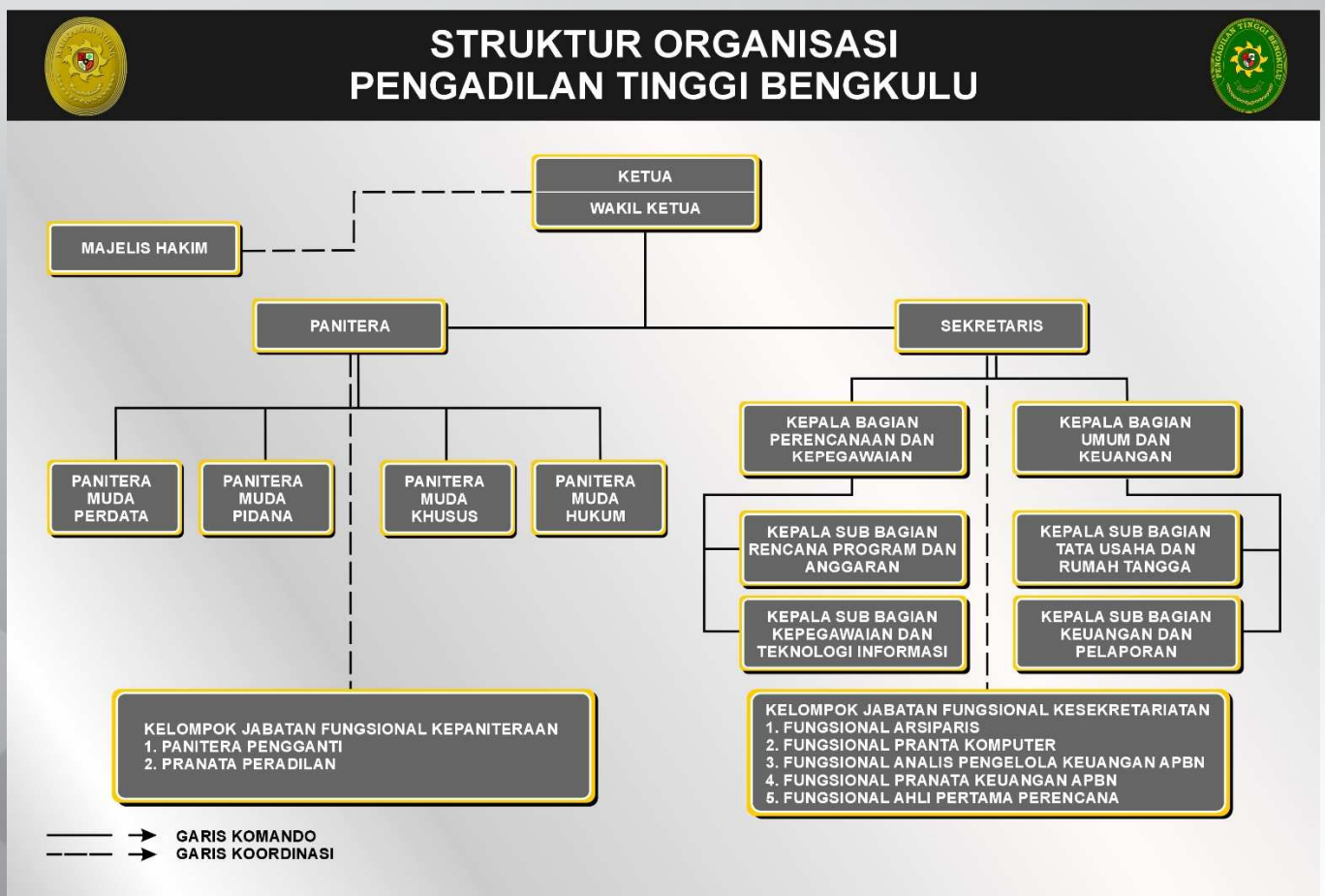


5. Penguatan tata kelola kelembagaan dan manajemen peradilan, melalui perencanaan yang efektif, pengelolaan sumber daya yang optimal, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

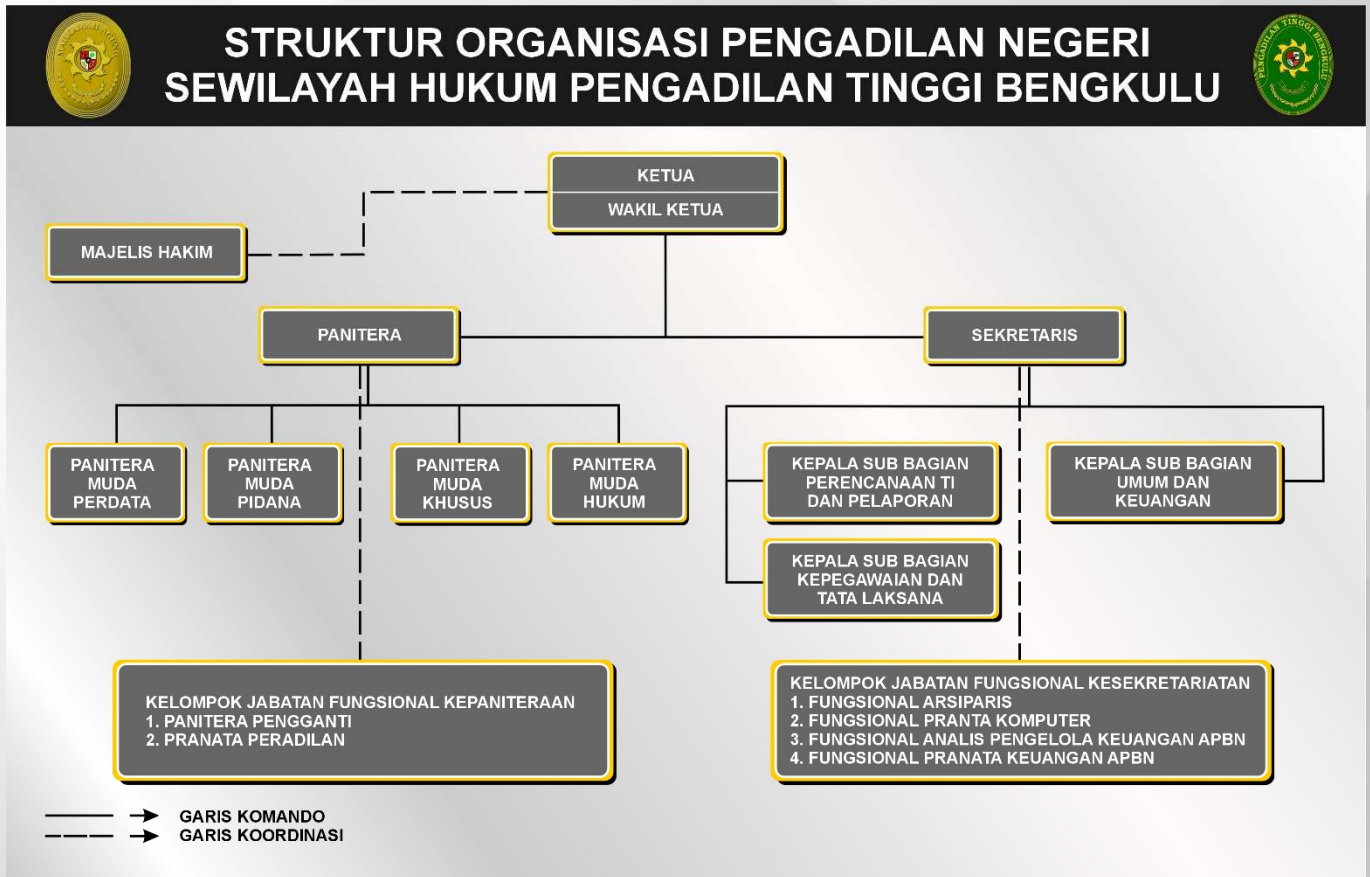
Melalui Rencana Strategis periode 2025-2029, Pengadilan Tinggi Bengkulu berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan. RENSTRA ini menjadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas peradilan, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja kelembagaan serta mendukung terwujudnya peradilan yang modern, profesional, dan berkeadilan sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu disusun sebagai kerangka kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penataan struktur organisasi dimaksudkan untuk memastikan kejelasan pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antarunit kerja, sehingga seluruh proses penyelenggaraan peradilan dapat berjalan secara terkoordinasi dan profesional. Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan sebagai unsur pendukung utama penyelenggaraan peradilan. Melalui struktur organisasi yang jelas dan tertata dengan baik, Pengadilan Tinggi Bengkulu diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional serta memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas kepada masyarakat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI

- A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi
Bengkulu dan Pengadilan Negeri
se-Wilayah Hukum Bengkulu
- B. Penyelesaian Perkara
- C. Akreditasi Penjamin Mutu



**ZONA
INTEGRITAS**



BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI

Data yang disajikan dalam Bab II ini merupakan data penanganan perkara selama periode Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, yang dihimpun secara sistematis dari seluruh Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, yaitu **Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Curup, Pengadilan Negeri Manna, Pengadilan Negeri Argamakmur, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Tubei, Pengadilan Negeri Kepahiang, dan Pengadilan Negeri Mukomuko.**

A. KEADAAN PERKARA

1. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA

a. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu

Berikut rincian keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 1. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
PIDANA						
1.	Pidana Biasa	82	513	0	516	79
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	27	0	27	0
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	3.546	0	3.546	0
5.	Pra Peradilan	2	12	0	11	3
6.	Pidana Anak	2	47	0	48	1
7.	Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	26	126	0	69	83
8.	Perikanan					
PERDATA						
1.	Perdata Gugatan	25	92	16	83	34
2.	Perdata Permohonan	0	125	1	119	6
3.	Gugatan Sedeharna	0	19	4	15	4
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	1	2	0	3	0
5.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	0	9	0	6	3
Jumlah		138	4.518	21	4.443	23

Gambar 3. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu



b. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Curup

Berikut rincian keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Curup Tahun 2025

Tabel 2. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Curup

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
PIDANA						
1.	Pidana Biasa	59	208	0	246	40
2.	Pidana Singkat	0	1	0	1	0
3.	Pidana Cepat	0	3	0	3	0
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	617	0	617	0
5.	Pra Peradilan	0	2	0	0	0
6.	Pidana Anak	3	10	0	13	1
7.	Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	0	0	0	0	0
8.	Perikanan	0	0	0	0	0
PERDATA						
1.	Perdata Gugatan	5	6	3	7	1
2.	Perdata Permohonan	2	188	5	185	0
3.	Gugatan Sedeharna	1	6	0	7	0
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	1	0	0	1	0
5.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	0	0	0	0	0
Jumlah		71	1.041	8	1.080	42

Gambar 4. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Curup


c. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Manna

Berikut rincian keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Manna Tahun 2025

Tabel 3. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Manna

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
PIDANA						
1.	Pidana Biasa	14	99	10	113	0
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	4	0	4	0

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	442	0	442	0
5.	Pra Peradilan	0	0	0	0	0
6.	Pidana Anak	0	18	0	18	0
7.	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0
8.	Perikanan	0	0	0	0	0
	PERDATA					
1.	Perdata Gugatan	4	3	0	5	2
2.	Perdata Permohonan	3	40	0	43	0
3.	Gugatan Sedeharna	1	34	11	22	2
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0	0
5.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	0	0	0	0	0
Jumlah		22	640	21	647	4

Gambar 5. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Manna



d. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Argamakmur

Berikut rincian keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Argamakmur Tahun 2025.

Tabel 4. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Argamakmur

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
	PIDANA					
1.	Pidana Biasa	10	206	0	188	28
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	35	0	35	0
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	1.617	0	1.617	0
5.	Pra Peradilan	0	1	0	1	0
6.	Pidana Anak	0	19	0	18	1
7.	Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	0	0	0	0	0
8.	Perikanan	0	0	0	0	0

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
	PERDATA					
1.	Perdata Gugatan	9	35	4	38	6
2.	Perdata Permohonan	0	9	0	9	0
3.	Gugatan Sedeharna	0	15	1	15	0
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	0	1	0	1	0
5.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	0	0	0	0	0
Jumlah		19	1.938	5	1.922	35

Gambar 6. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Argamakmur



e. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan

Berikut rincian keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025.

Tabel 5. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
	PIDANA					
1	Pidana Biasa	7	73	0	70	10
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	5	0	5	0
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	51	0	51	0
5.	Pra Peradilan	0	0	0	0	0
6.	Pidana Anak	0	4	0	4	0
7.	Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	0	0	0	0	0
8.	Perikanan	0	0	0	0	0
	PERDATA					
1.	Perdata Gugatan	0	4	0	4	0
2.	Perdata Permohonan	0	11	0	11	0
3.	Gugatan Sedeharna	0	0	0	0	0
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0	0
5.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	0	0	0	0	0
Jumlah		7	148	0	145	10

Gambar 7. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan



f. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tais

Berikut rincian keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Tais Tahun 2025.

Tabel 6. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tais

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
PIDANA						
1.	Pidana Biasa	2	63	0	58	7
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	35	0	35	0
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	588	0	588	0
5.	Pra Peradilan	0	1	0	1	0
6.	Pidana Anak	1	5	0	6	0
7.	Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	0	0	0	0	0
8.	Perikanan	0	0	0	0	0
PERDATA						
1.	Perdata Gugatan	2	9	1	10	1
2.	Perdata Permohonan	1	28	4	29	0
3.	Gugatan Sedeharna	0	3	1	3	0
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0	0
5.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	0	0	0	0	0
Jumlah		6	732	6	730	8

Gambar 8. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Tais



g. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tubei

Berikut rincian keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2025.

Tabel 7. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tubei

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
PIDANA						
1.	Pidana Biasa	8	75	0	82	1
2.	Pidana Singkat	0	5	0	5	0
3.	Pidana Cepat	0	4	0	4	0
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	712	0	712	0
5.	Pra Peradilan	0	0	0	0	0
6.	Pidana Anak	0	8	0	8	0
7.	Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	0	0	0	0	0
8.	Perikanan	0	0	0	0	0
PERDATA						
1.	Perdata Gugatan	0	7	0	5	2
2.	Perdata Permohonan	0	2	0	2	0
3.	Gugatan Sedeharna	0	0	0	0	0
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0	0
5.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	0	0	0	0	0
Jumlah		8	813	0	818	3

Gambar 9. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Tubei



h. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang

Berikut rincian keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2025.

Tabel 8. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
PIDANA						
1.	Pidana Biasa	3	99	0	102	8
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	2	0	2	0

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	505	0	505	0
5.	Pra Peradilan	0	2	2	0	0
6.	Pidana Anak	1	9	0	10	0
7.	Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	0	0	0	0	0
8.	Perikanan	0	0	0	0	0
	PERDATA					
1.	Perdata Gugatan	0	11	3	9	2
2.	Perdata Permohonan	0	42	0	42	0
3.	Gugatan Sedeharna	0	5	1	5	0
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	0	1	0	0	1
5.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	0	0	0	0	0
	Jumlah	4	676	6	675	11

Gambar 10. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang



i. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Mukomuko

Berikut rincian keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Mukomuko Tahun 2025.

Tabel 9. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Mukomuko

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
	PIDANA					
1	Pidana Biasa	12	88	0	89	14
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	52	0	52	0
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	738	0	738	0
5.	Pra Peradilan	0	0	0	0	0
6.	Pidana Anak	0	6	0	6	0
7.	Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	0	0	0	0	0
8.	Perikanan	0	0	0	0	0

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
	PERDATA					
1.	Perdata Gugatan	4	22	5	11	10
2.	Perdata Permohonan	1	38	4	35	0
3.	Gugatan Sedeharna	0	4	0	4	0
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0	0
5.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	0	0	0	0	0
Jumlah		17	948	9	935	24

Gambar 11. Grafik Kinerja Perkara Pengadilan Negeri Mukomuko



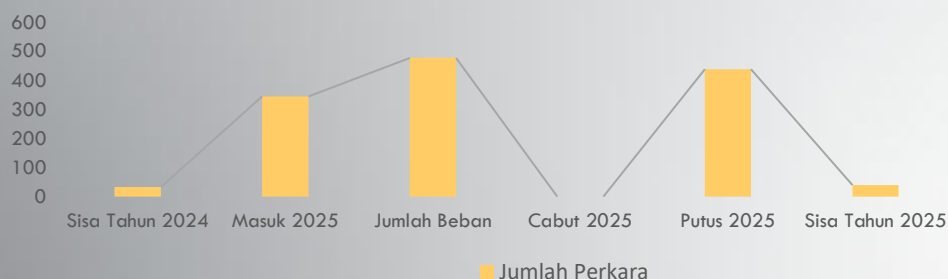
2. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT BANDING

Berikut rincian keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 10. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Tahun 2025	% Putus
Perdata	2	50	52	0	46	6	88,46%
Pidana Biasa	28	358	386	0	352	34	91,19%
Pidana Anak	0	18	18	0	18	0	100%
Tipikor	3	19	22	0	22	0	100%
Jumlah	33	345	478	0	438	40	91,63%

Gambar 12. Grafik Kinerja Perkara di Tingkat Banding



3. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT KASASI

Berikut rincian keadaan perkara di tingkat Kasasi pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 11. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Kasasi Di Tahun 2025	Jumlah Perkara Kasasi Yang Putus Di Tahun 2025
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	Pidana	141	177
		Perdata	17	13
		Pidana Khusus	21	18
		Perdata Khusus	7	4
2.	Pengadilan Negeri Curup	Pidana	77	89
		Perdata	0	0
		Pidana Khusus	6	11
		Perdata Khusus	0	0
3.	Pengadilan Negeri Manna	Pidana	8	7
		Perdata	1	0
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	Pidana	25	31
		Perdata	11	5
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	Pidana	0	0
		Perdata	0	0
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0
6.	Pengadilan Negeri Tais	Pidana	10	10
		Perdata	0	0
		Pidana Khusus	1	1
		Perdata Khusus	0	0
7.	Pengadilan Negeri Tubei	Pidana	14	14
		Perdata	0	0
		Pidana Khusus	2	2
		Perdata Khusus	0	0
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	Pidana	3	2
		Perdata	0	0
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	Pidana	13	13
		Perdata	0	0
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0

4. KEADAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

Berikut rincian keadaan perkara Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 12. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Di Tahun 2025	Jumlah Perkara Peninjauan Kembali (PK) Yang Putus di Tahun 2025
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	Pidana	31	22
		Perdata	3	1
		Pidana Khusus	10	5
		Perdata Khusus	0	0
2.	Pengadilan Negeri Curup	Pidana	32	54
		Perdata	0	0
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0
3.	Pengadilan Negeri Manna	Pidana	0	0
		Perdata	0	0
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	Pidana	13	6
		Perdata	1	2
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	Pidana	0	0
		Perdata	0	0
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0
6.	Pengadilan Negeri Tais	Pidana	0	0
		Perdata	0	0
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0
7.	Pengadilan Negeri Tubei	Pidana	4	4
		Perdata	0	0
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	Pidana	15	8
		Perdata	0	0
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	Pidana	7	4
		Perdata	1	2
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, batas waktu penyelesaian perkara ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan untuk perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan paling lama 5 (lima) bulan untuk perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama. Berikut disajikan rincian jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu selama Tahun 2025.

Tabel 13. Jumlah Perkara Tingkat Banding Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2025	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu
Perdata	46	46	0	100%
Pidana Biasa	352	352	0	100%
Pidana Anak	18	18	0	100%
Tipikor	22	22	0	100%
Jumlah	438	438	0	100%

Tabel 14. Jumlah Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu

No	Satuan Kerja	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2025	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	Pidana	602	602	0	100%
		Perdata	220	195	25	88,63%
		Pidana Khusus	69	69	0	100%
		Perdata Khusus	7	7	0	100%
2.	Pengadilan Negeri Curup	Pidana	246	246	0	100%
		Perdata	0	0	0	0
		Pidana Khusus	13	13	0	100%
		Perdata Khusus	0	0	0	0
3.	Pengadilan Negeri Manna	Pidana	95	95	0	100%
		Perdata	4	4	0	100%
		Pidana Khusus	0	0	0	100%
		Perdata Khusus	0	0	0	0
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	Pidana	188	188	0	100%
		Perdata	38	29	9	75%
		Pidana Khusus	0	0	0	0
		Perdata Khusus	0	0	0	0

No	Satuan Kerja	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2025	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	Pidana	70	70	0	100%
		Perdata	15	15	0	100%
		Pidana Khusus	4	4	0	100%
		Perdata Khusus	0	0	0	0
6.	Pengadilan Negeri Tais	Pidana	58	58	0	100%
		Perdata	39	39	0	100%
		Pidana Khusus	5	5	0	100%
		Perdata Khusus	0	0	0	0
7.	Pengadilan Negeri Tubei	Pidana	82	82	0	100%
		Perdata	7	7	0	100%
		Pidana Khusus	8	8	0	100%
		Perdata Khusus	0	0	0	0
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	Pidana	9	9	0	100%
		Perdata	94	94	0	100%
		Pidana Khusus	9	9	0	100%
		Perdata Khusus	0	0	0	0
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	Pidana	147	147	0	100%
		Perdata	50	50	1	
		Pidana Khusus	6	6	0	100%
		Perdata Khusus	0	0	0	0

2. PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Berikut rincian jumlah perkara di tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Tabel 15. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Perkara PN Yang Putus Tahun 2025 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		Perkara PN Yang Putus Tahun 2024 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		Perkara PN Yang Putus Tahun 2025 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	
				Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1.	PN Bengkulu	Pidana	602	429	71,26%	461	76,57%	571	94,85%
		Perdata	220	191	86,81%	203	92,22%	217	95,59%
		Pidana Khusus	69	49	71%	48	69,56%	62	89,85%
		Perdata Khusus	7	7	100%	0	0%	0	0%

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2025	Perkara PN Yang Putus Tahun 2024 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		Perkara PN Yang Putus Tahun 2025 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		Perkara PN Yang Putus Tahun 2025 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	
				Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
2.	PN Curup	Pidana	246	154	62%	168	68%	245	99%
		Perdata	0	0	0	0	0	0	0
		Pidana Khusus	12	6	50%	6	50%	0	0
		Perdata Khusus	0	0	0	0	0	0	0
3.	PN Manna	Pidana	95	89	90%	90	95%	90	95%
		Perdata	6	4	66%	5	83%	5	83%
		Pidana Khusus	0	0	0	0	0	0	0
		Perdata Khusus	0	0	0	0	0	0	0
4.	PN Argamakmur	Pidana	206	177	85,9%	186	90,2%	193	93,6%
		Perdata	38	22	47%	30	68%	44	100%
		Pidana Khusus	0	0	0	0	0	0	0
		Perdata Khusus	0	0	0	0	0	0	0
5.	PN Bintuhan	Pidana	70	63	90%	70	100%	70	100%
		Perdata	15	13	88,24%	15	100%	15	100%
		Pidana Khusus	4	4	100%	4	100%	4	100%
		Perdata Khusus	0	0	0	0	0	0	0
6.	PN Tais	Pidana	58	44	75,86%	48	82,76%	58	100%
		Perdata	39	37	94,87%	39	100%	39	100%
		Pidana Khusus	5	4	80%	4	80%	5	100%
		Perdata Khusus	0	0	0	0	0	0	0
7.	PN Tubei	Pidana	82	55	67%	68	83%	78	95%
		Perdata	0	0	0	0	0	0	0
		Pidana Khusus	8	6	75%	6	75%	0	0
		Perdata Khusus	0	0	0	0	0	0	0
8.	PN Kepahiang	Pidana	94	86	91,48%	92	97,87%	89	94,68%
		Perdata	9	0	0	9	100%	9	100%
		Pidana Khusus	9	9	100%	9	100%	9	100%
		Perdata Khusus	0	0	0	0	0	0	0
9.	PN Mukomuko	Pidana	147	130	88,43%	134	91,15%	140	95,23%
		Perdata	50	50	100%	50	100%	50	100%
		Pidana Khusus	6	6	100%	6	100%	6	100%
		Perdata Khusus	0	0	0	0	0	0	0

3. PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan keadaan akibat tindak pidana melalui musyawarah antara korban, pelaku, dan pihak terkait, dengan tujuan mencapai keadilan yang berimbang, bermanfaat, dan manusiawi, bukan semata-mata penghukuman. Berikut rincian keadaan perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 16. Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

No	Nama Pengadilan	Perkara Yang Memenuhi Syarat	Berhasil Restoratif Justice	Rasio Berhasil Restoratif Justice
1	Pengadilan Negeri Bengkulu	0	0	0
2.	Pengadilan Negeri Curup	29	6	20,68%
3.	Pengadilan Negeri Manna	30	5	16,66%
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	4	4	100%
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	4	3	75%
6.	Pengadilan Negeri Tais	0	0	0
7.	Pengadilan Negeri Tubei	6	6	100%
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	7	3	42.85%
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	59	59	100%
Jumlah		139	86	61,87%

4. PERKARA YANG BERAHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Mediasi di Pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggara mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak tersebut untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Berikut ini jumlah perkara perdata tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 yang berhasil mediasi.

Tabel 17. Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2025	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	54	0	0	0	0
2.	Pengadilan Negeri Curup	1	1	3	1	0
3.	Pengadilan Negeri Manna	2	2	6	3	0
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	1	1	34	15	1

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2025	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	0	0	0	0	0
6.	Pengadilan Negeri Tais	3	0	3	0	0
7.	Pengadilan Negeri Tubei	1	1	4	0	0
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	1	1	0	0	0
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	1	4	1	1	10
Jumlah		64	10	51	20	11

5. PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Berikut ini jumlah perkara pidana anak tahun 2025 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 yang berhasil melakukan diversi.

Tabel 18. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2025	Jumlah perkara Pidana Anak Yang Diversi Tahun 2025	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	47	8	1	7	0	0
2.	Pengadilan Negeri Curup	10	6	3	3	0	0
3.	Pengadilan Negeri Manna	16	2	2	14	0	0
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	19	5	1	4	14	0
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	4	0	0	0	0	0
6.	Pengadilan Negeri Tais	5	2	2	0	0	0
7.	Pengadilan Negeri Tubei	8	1	0	0	0	1
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	9	2	1	1	0	0
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	6	1	1	0	0	0
Jumlah		124	27	11	29	14	1

6. PERKARA PERDATA YANG MENGGUNAKAN e-COURT

Layanan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berikut gambaran perkara perdata yang diproses melalui sistem e-Court pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 19. Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court

No	Nama Pengadilan	Perkara Perdata Masuk	Menggunakan e-Court	Rasio Perkara Perdata Menggunakan e-Court
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	247	247	100%
2.	Pengadilan Negeri Curup	200	200	100%
3.	Pengadilan Negeri Manna	44	44	100%
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	60	60	100%
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	17	17	100%
6.	Pengadilan Negeri Tais	40	40	100%
7.	Pengadilan Negeri Tubei	9	9	100%
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	58	58	100%
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	64	64	100%
Jumlah		739	739	100%

7. PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (e-BERPADU)

Berikut gambaran perkara perdata yang diproses melalui sistem e-Court pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025, yaitu layanan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Tabel 20. Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)

No	Nama Pengadilan	Perkara Pidana Masuk	Dilimpahkan Via e-Berpadu	Rasio Dilimpahkan Perkara Pidana Via e-Berpadu
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	680	680	100%
2.	Pengadilan Negeri Curup	208	208	100%
3.	Pengadilan Negeri Manna	114	111	100%
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	206	206	100%
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	87	77	88,50%
6.	Pengadilan Negeri Tais	68	68	100%
7.	Pengadilan Negeri Tubei	779	779	100%
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	108	108	100%
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	94	89	94,68%
Jumlah		2.344	2.326	99,23%

8. LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (e-BERPADU)

Untuk meningkatkan efisiensi, keterpaduan, dan akuntabilitas pelayanan peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Sistem Informasi Penanganan Perkara Pidana Terpadu (e-Berpadu), berikut ini disajikan gambaran layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui sistem e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 21. Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)

No	Nama Pengadilan	Jumlah Layanan Perkara Pidana	Layanan Via e-Berpadu	Rasio Layanan Perkara Pidana Via e-Berpadu
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	6207	6207	100%
2.	Pengadilan Negeri Curup	208	208	100%
3.	Pengadilan Negeri Manna	265	265	100%
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	932	932	100%
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	636	636	100%
6.	Pengadilan Negeri Tais	426	426	100%
7.	Pengadilan Negeri Tubei	779	779	100%
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	444	444	100%
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	429	429	100%
Jumlah		10.326	10.326	100%

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. POSBAKUM (SATKER YANG MENDAPATKAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN)

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah layanan yang ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu, karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advice hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Berikut data alokasi dan realisasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 22. Posbakum Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

No	Satuan Kerja	Jumlah Anggaran Posbakum (Rp)	Realisasi Anggaran Posbakum		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum (Orang)
			(Rp)	(%)	
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	44.000.000,00	44.000.000,00	100%	194
2.	Pengadilan Negeri Curup	28.000.000,00	28.000.000,00	100%	310
3.	Pengadilan Negeri Manna	22.000.000,00	21.980.000,00	99%	165

No	Satuan Kerja	Jumlah Anggaran Posbakum (Rp)	Realisasi Anggaran Posbakum		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum (Orang)
			(Rp)	(%)	
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	28.000.000,00	28.000.000,00	100%	156
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	30.000.000,00	30.000.000,00	100%	300
6.	Pengadilan Negeri Tais	28.000.000,00	28.000.000,00	100%	67
7.	Pengadilan Negeri Tubei	24.000.000,00	24.000.000,00	100%	11
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	28.800.000,00	28.800.000,00	100%	310
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	28.000.000,00	28.000.000,00	100%	34
Jumlah		260.800.000,00	260.780.000,00	99,99%	1.547

2. SIDANG KELILING ATAU PELAYANAN TERPADU

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala tersebut di prioritaskan Program Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Berikut data layanan sidang diluar gedung Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 23. Sidang Keliling Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

No	Satuan Kerja	Jumlah Zitting Plaatz	Lokasi Sidang Zitting Plaatz	Jumlah Perkara Diselesaikan Di Zitting Plaatz Tahun 2025
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	0	0	0
2.	Pengadilan Negeri Curup	0	0	0
3.	Pengadilan Negeri Manna	3	Pasar Manna, Kota Manna	3
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	1	Kabupaten Bengkulu Tengah	35
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	0	0	0
6.	Pengadilan Negeri Tais	0	0	0
7.	Pengadilan Negeri Tubei	0	0	0
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	21	Gedung Mall Pelayanan Publik Kepahiang	21
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	0	0	0

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses perkara di pengadilan. Berikut data Prodeo pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 24. Perkara Prodeo Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan Tahun 2025	Jumlah Anggaran Prodeo (Rp)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	(%)
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	2	205.000,00	140.000,00	68,29%
2.	Pengadilan Negeri Curup	1	85.000,00	85.000,00	100%
3.	Pengadilan Negeri Manna	3	310.000,00	310.000,00	100%
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	2	450.000,00	120.000,00	26,66%
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	1	670.000,00	80.000,00	11,94%
6.	Pengadilan Negeri Tais	12	720.000,00	720.000,00	100%
7.	Pengadilan Negeri Tubei	0	0	0	0
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	8	1.080.000,00	962.000,00	90,93%
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	0	0	0	0
Jumlah		29	3.435.000,00	2.417.000,00	70,36%



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani bangsa



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi SDM Berdasarkan
Kepangkatan/Golongan/Pendidikan



ZONA
INTEGRITAS



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada beberapa Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi, namun masih ada Pengadilan Negeri yang mengalami kekosongan pada beberapa formasi jabatan dan kekurangan sumber daya manusia khususnya tenaga staf atau pelaksana (Klerik). Berikut ini rincian sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

1. SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Pengadilan Tinggi, 15 (lima belas) orang Hakim Tinggi, 1 (dua) orang Hakim Tinggi Yustisial, 3 (tiga) orang Hakim Tinggi AD HOC, 2 (dua) orang Hakim Yustisial, 12 (dua belas) orang Pejabat Struktural, 10 (sepuluh) orang Panitera Pengganti, 7 (tujuh) orang Fungsional Tertentu, 11 (sebelas) orang PPPK, 18 (delapan belas) orang Pelaksana, 3 (Tiga) orang CPNS. Rincian sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 dijelaskan pada tabel 25 dibawah ini.

Tabel 25. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.	96005031988041001	Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
2.	MERRYWATI TB, S.H., M.Hum.	195912051986122001	Hakim Tinggi PT Bengkulu
3.	SURUNG SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	196108221988031002	Hakim Tinggi PT Bengkulu
4.	BAMBANG EKA PUTRA, S.H., M.H.	196606181992121001	Hakim Tinggi PT Bengkulu
5.	H. SUMEDI, S.H., M.H.	196211161992121001	Hakim Tinggi PT Bengkulu
6.	R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H.	196501011992121001	Hakim Tinggi PT Bengkulu
7.	SARAH LOUIS SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.	196503271992122001	Hakim Tinggi PT Bengkulu
8.	H. DUTA BASKARA, S.H., M.H.	196404211991031004	Hakim Tinggi PT Bengkulu
9.	H. SAHLAN EFENDI, S.H., M.H.	196504141993031006	Hakim Tinggi PT Bengkulu
10.	Hj. NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.	196711261992122001	Hakim Tinggi PT Bengkulu
11.	JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.	196507131992121001	Hakim Tinggi PT Bengkulu
12.	ARMAN SURYA PUTRA, S.H., M.H.	197411181999031001	Hakim Tinggi PT Bengkulu
13.	NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.	196607241994032005	Hakim Tinggi PT Bengkulu
14.	AZHARI, S.H., M.H.	196903021990031003	Hakim Tinggi PT Bengkulu
15.	MUKHLIS, S.H.	196812311995031013	Hakim Tinggi PT Bengkulu
16.	SARUDI, S.H.	196705091996031004	Hakim Tinggi PT Bengkulu
17.	BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.	196001121986121001	Hakim Tinggi Yustisial
18.	Drs. H. ERWIN WIDANARKO, S.H., S.AP., M.Pd.	196401141987031003	Hakim Ad Hoc PT Bengkulu

NO	NAMA	NIP	JABATAN
19.	SAMSUL HADI, S.H., M.Sc.	195302102011000029	Hakim Ad Hoc PT Bengkulu
20.	BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, S.H., M.H.	19600628202003029	Hakim Ad Hoc PT Bengkulu
21.	M TEGUH SE, S.H., M.H.	196605221989031004	Panitera PT Bengkulu
22.	NURSANI, S.H.	196606101991031005	Sekretaris PT Bengkulu
23.	RIO DESTRADO, S.H.	197712112002121004	Hakim Yustisial PT Bengkulu
25.	TETTY SISKHA, S.H., M.H.	198204262008052001	Hakim Yustisial PT Bengkulu
24.	UMI KALSUM, S.Sos.	196807281990032003	Kabag Umum dan Keuangan
26.	YURNI HENDARWATI, S.Pd.	197010121992032001	Kabag Renprog dan TI
27.	ZULMAHRI, S.H.	196511151983031001	Panitera Muda PT Bengkulu
28.	SYAWALUDDIN, S.H.	198008182007041001	Panitera Muda PT Bengkulu
29.	M. ALI EL FAHMI, S.T.	197506292005021001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Tingkat Banding
30.	RINA ASTUTI, S.E.	197308302006042015	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Tingkat Banding
31.	LINDA NORA, S.Kom., SH.	197706102009042004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Tingkat Banding
32.	FIDIYAH SISTONA, S.E.	198203312009042001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Tingkat Banding
33.	MANZIR, S.H.	196603191998031002	Plt. Panmud Tipikor/ Panitera Pengganti
34.	IRWAN HEMDI, S.H.	196609121989031002	Plt. Panmud Hukum/ Panitera Pengganti
35.	DARNO, S.H.	196402021983031001	Panitera Pengganti
36.	ZEKMA, S.H.	196409141985032004	Panitera Pengganti
37.	GARINI MARTATI, S.H.	196703101987032001	Panitera Pengganti
38.	KARDINI, S.H.	196703191990031001	Panitera Pengganti
39.	FATMAWATI, S.H.	196707081989032011	Panitera Pengganti
40.	NAZORI, S.H.	196910091989031002	Panitera Pengganti
42.	FRIESDA ROTUA RUMONDANG, S.E.	198806032011012010	Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
42.	MUHAMMAD PRANA CAHAYA, S.Kom., S.H.	198306032009121004	Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
43.	IRDIAN NOFRIANSYAH, S.H.	198511072006041005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
44.	VARLIAN AGUSTINI, S.E.	198102162009042008	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama
45.	RIKA ANGGRAINI, S.IP.	198908102019032005	Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
46.	FANDY JUNIARIO SIMORANGKIR, S.Kom.	199306242019031004	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama
47.	CUZAINTRA BAROS, S.T., M.M.S.I.	198810012019031006	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama
48.	AGIEF MUFTAHID, S.Kom.	199702182020121006	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama
49.	SESTI SAPITTRI, S.E.	198709252009122005	Fungsional Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Penyelia
50.	SISKA VITRIANI	198512092006042002	Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil

NO	NAMA	NIP	JABATAN
51.	DONAL, S.E.	198204202023211007	Fungsional Perencana Ahli Pertama/PPPK
52.	SERLI HERLINA, S.M.	198509182023212039	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama/PPPK
53.	FETTY YUNIZA, S.H.	198206062006042008	Pelaksana Analis Perkara Peradilan Tingkat Banding
54.	FENTI WIDYASTUTI, S.H.	198509092008052001	Pelaksana Analis Perkara Peradilan Tingkat Banding
55.	YUN HERAWATI, S.Kom.	197911202009042003	Pelaksana Penata Layanan Operasional Tingkat Banding
56.	YENNI KOMALASARI, S.H.	198908072012122002	Pelaksana Penata Layanan Operasional Tingkat Banding
57.	RINI TRI WAHYUNI, S.H.	198502202014032004	Pelaksana Penata Layanan Operasional Tingkat Banding
58.	LISTIKA RAHMA DANIA, S.H.	198804262014032001	Pelaksana Penata Layanan Operasional Tingkat Banding
59.	IKA IKMASSARI, S.H.	198810222014032001	Pelaksana Analis Perkara Peradilan Tingkat Banding
60.	WINDYA PRABAWATI, S.H.	198805122014032006	Pelaksana Analis Perkara Peradilan Tingkat Banding
61.	HARDI RAMADHAN, S.E.	198705062015031001	Pelaksana Penata Keprotokolan Tingkat Banding
62.	VERA ANGGRAINI, SH., M.H.	198806112015052001	Pelaksana Analis Perkara Peradilan Tingkat Banding
63.	GENTE ADWINZERINDO PUTRA, S.I.P	199410182020121001	Pelaksana Penata Layanan Operasional Tingkat Banding
64.	ROSA DESVANA, S.Akun.	199612202020122009	Pelaksana Penata Layanan Operasional Tingkat Banding
65.	TOMMY AFRIAWAN, S.E.	198609232022031002	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan Tingkat Banding
66.	NEVI ERMI NENGSIH, S.E.	199102182022032005	Pelaksana Penata Layanan Operasional Tingkat Banding
67.	HARINI KURNIATI	198507242006042001	Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran Tingkat Banding
68.	ENDANG WIJAYA, S.H.	198005092012121001	Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran Tingkat Banding
69.	DWIPRAJA KUMARA ZUMA, S.H.	199110302022031004	Pelaksana Analis Perkara Peradilan Tingkat Banding
70.	MOHD. HARYO JULIAN PUTRA, S.H.	199407052022031011	Pelaksana Analis Perkara Peradilan Tingkat Banding
71.	RIPAN YUDISTRA SITEPU, S.H.	200106012024051002	Pelaksana Analis Perkara Peradilan Tingkat Banding
72.	M. HAFIDZ RAMADHAN, S.T.	199701242025061010	CPNS Teknisi Sarana dan Prasarana, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
73.	HANS KHALIF HAFIF, S.T.	200106262025061006	CPNS Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
74.	EGA SUARTHA WIJAYA, A.Md.Kom.	199912122025061010	CPNS Klerek - Dokumentalis Hukum, Panitera Muda Hukum
75.	HENDRI IRAWAN	197006052025211051	PPPK

NO	NAMA	NIP	JABATAN
76.	SUNARDI	197406042025211021	PPPK
77.	WAHYU SURAHMAT POHAN	199404022025211030	PPPK
78.	MUHAMMAD MUKHLIS	199706152025211026	PPPK
79.	DICO JUNIRIYANTO PRATOMO	198806162025211038	PPPK
80.	KADEK PERMANA SESA	198604182025211035	PPPK
81.	FITRYAWAN	198306152025211056	PPPK
82.	AHAYUDIN	198009102025211035	PPPK
83.	ILIS SUHADI	197906062025211049	PPPK

2. SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Rincian jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025, terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 26. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (Satuan Kerja)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PN Bengkulu	PN Curup	PN Manna	PN Argamakmur	PN Bintuhan	PN Tais	PN Tubei	PN Kepahiang	PN Mukomuko
1.	Ketua	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Wakil Ketua	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Hakim	9	9	7	9	7	7	6	7	6
4.	Hakim Adhoc Tipikor	5	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hakim Adhoc PHI	3	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Hakim Adhoc Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Panitera	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Wakil Panitera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Panmud Pidana	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Panmud Perdata	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Panmud Hukum	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Panmud Tipikor	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Panmud PHI	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Panmud Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Panitera Pengganti	11	6	1	1	0	2	1	1	2
16.	Jurusita/Jurusita Pengganti	8	2	2	1	1	3	2	1	1
17.	Sekretaris	1	1	1	1	0	1	1	1	1
18.	Ka. Sub. Bag. PTIP	1	1	1	1	0	1	1	1	1
19.	Ka. Sub. Bag. Umum dan Keuangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Ka. Sub. Bag. Kepegawaian dan Ortala	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	Tenaga Non Teknis/Fungsional/Pelaksana	27	14	13	18	10	17	6	17	16
22.	PPPK/Tenaga Honorar	12	6	3	0	6	0	6	0	0
Jumlah		87	47	36	39	32	39	31	36	35

3. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK GOLONGAN

Jumlah Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 sebanyak 442 orang. Berikut rincian jumlah Hakim dan Pegawai berdasarkan kelompok golongan.

Tabel 27. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Golongan

No	Satuan Kerja	Golongan IV (Orang)	Golongan III (Orang)	Golongan II (Orang)	Golongan I (Orang)	Golongan IX (Orang)	Golongan V (Orang)
1.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	25	44	2	0	2	0
2.	Pengadilan Negeri Bengkulu	6	45	7	0	5	7
3.	Pengadilan Negeri Curup	8	28	5	-	3	3
4.	Pengadilan Negeri Manna	3	21	4	2	3	0
5.	Pengadilan Negeri Argamakmur	2	35	5	4	3	0
6.	Pengadilan Negeri Bintuhan	3	20	3	5	1	0
7.	Pengadilan Negeri Tais	2	26	6	0	2	3
8.	Pengadilan Negeri Tubei	2	19	4	5	1	0
9.	Pengadilan Negeri Kepahiang	2	24	4	0	3	0
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	3	21	3	0	1	7
Jumlah		56	283	43	16	24	20

4. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN

Berikut rincian Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 berdasarkan kelompok pendidikan.

Tabel 28. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Pendidikan

No	Satuan Kerja	Tingkat Pendidikan						
		S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA
1.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	2	23	47	1	0	0	11
2.	Pengadilan Negeri Bengkulu	0	26	46	6	0	0	10
3.	Pengadilan Negeri Curup	1	9	29	5	0	0	3
4.	Pengadilan Negeri Manna	0	4	21	5	0	0	3
5.	Pengadilan Negeri Argamakmur	0	7	23	4	0	0	5
6.	Pengadilan Negeri Bintuhan	0	7	17	3	0	0	5
7.	Pengadilan Negeri Tais	0	5	24	5	0	0	5
8.	Pengadilan Negeri Tubei	0	6	15	4	0	0	6
9.	Pengadilan Negeri Kepahiang	0	8	20	4	0	0	3
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	0	6	18	4	0	0	7
Jumlah		3	101	260	41	0	0	58

5. PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA

Mahkamah Agung telah memberikan tanda penghargaan kepada Hakim dan pegawai Mahkamah Agung yang telah berbakti selama 8 tahun, 16 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian. Berikut rincian jumlah penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 29. Penghargaan Satya Lencana

No	Satuan Kerja	Penghargaan				
		SATYA LENCANA KARYA SATYA XXX (Orang)	SATYA LENCANA KARYA SATYA XX (Orang)	SATYA LENCANA KARYA SATYA X (Orang)	KARYA SATYA SEWINDU (Orang)	KARYA SATYA SEWINDU (Orang)
1.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	30	26	25	17	15
2.	Pengadilan Negeri Bengkulu	1	2	5	1	0
3.	Pengadilan Negeri Curup	0	0	0	0	0
4.	Pengadilan Negeri Manna	1	2	11	8	4
5.	Pengadilan Negeri Argamakmur	0	0	5	0	0
6.	Pengadilan Negeri Bintuhan	0	0	1	0	0
7.	Pengadilan Negeri Tais	0	0	1	1	0
8.	Pengadilan Negeri Tubei	0	1	3	0	0
9.	Pengadilan Negeri Kepahiang	0	2	14	0	0
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	0	0	5	0	0
Jumlah		32	33	70	27	19

B. PROMOSI DAN MUTASI

Berikut rincian promosi dan mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 30. Mutasi Masuk Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi Dari)
1.	Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum,	KPT Bengkulu	PT Kalimantan Utara
2.	BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi non palu	PT Banten
3.	SARAH LOUIS SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	PT Kalimantan Utara
4.	M TEGUH SE, S.H., M.H.	Panitera	PN Palembang
5.	NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PN Semarang
6.	SARUDI, S.H.	Hakim Tinggi	PN Gresik
7.	MUKHLIS, S.H.	Hakim Tinggi	PN Banda Aceh
8.	AZHARI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PN Banda Aceh
9.	ARMAN SURYA PUTRA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Mahkamah Agung RI
10.	SYAWALUDDIN, S.H.	Panmud Perdata	PN Mukomuko

No	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi Dari)
11.	TETTY SISKHA, S.H., M.H.	Hakim non Palu	PN Kisaran
12.	CUZAINTRA BAROS, S.T.	Prakom	PA Bekasi
13.	NEVI ERMI NENGSIH, S.E.	Pelaksana	PN Lubuklinggau
14.	FANDY JUNIARIO SIMORANGKIR, S.Kom.	Prakom	PN Bengkulu
15.	GENTE ADWINZERINDO PUTRA, S.I.P.	Pelaksana	PT Palembang

Tabel 31. Mutasi Keluar Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi Keluar Ke)
1.	ROSMINA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT Medan
2.	YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT Padang
3.	DARMITA	Panitera Pengganti	PT Padang
4.	JONI, S.H., M.H.	WKPT	PT Padang
5.	SAIMAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT Palembang
6.	SYAHRI ADAMY, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT Tanjung Karang
7.	Drs. ASMAR JOSEN, S.H., M.H.	Panitera	PT Medan
8.	R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Diklat MA
9.	AGUNG HARTATO, S.H.	Hakim	PN Mentok
10.	IRWAN KURNIAWAN, S.H.	Panitera Pengganti	PN Arga Makmur

Tabel 32. Promosi dan Mutasi Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Jabatan	Jumlah Promosi/ Mutasi Masuk (Orang)	Jumlah Promosi/ Mutasi Keluar (Orang)
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	Hakim Karier	2	3
		Hakim Adhoc	3	2
		Struktural (Non Hakim)	2	1
		Fungsional	1	1
		Pelaksana	1	1
2.	Pengadilan Negeri Curup	Hakim Karier	11	4
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim))	1	1
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	4	0
3.	Pengadilan Negeri Manna	Hakim Karier	8	8
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	0	0
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	0	0

No	Satuan Kerja	Jabatan	Jumlah Promosi/ Mutasi Masuk (Orang)	Jumlah Promosi/ Mutasi Keluar (Orang)
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	Hakim Karier	9	4
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	1	2
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	1	2
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	Hakim Karier	7	4
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	1	1
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	3	0
6.	Pengadilan Negeri Tais	Hakim Karier	7	5
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	0	0
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	3	1
7.	Pengadilan Negeri Tubei	Hakim Karier	6	0
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	1	0
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	0	0
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	Hakim Karier	7	5
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	3	2
		Fungsional	0	3
		Pelaksana	0	0
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	Hakim Karier	7	6
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	3	2
		Fungsional	1	0
		Pelaksana	1	1

C. Pensiun

Pensiun bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Bengkulu serta Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan bagian dari sistem manajemen sumber daya manusia peradilan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data pensiun Tahun 2025 mencerminkan dinamika kebutuhan organisasi sekaligus menjadi dasar perencanaan penataan sumber daya aparatur di lingkungan peradilan. Berikut data pensiun Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 33. Pensiun di Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	RIZWAN MANADI, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	01 Februari 2025
2.	TURIJAN, S.H.	Panitera Muda Hukum	01 Oktober 2025
3.	ALIDIN, S.H.	Panitera Muda Pidsus Tipikor	01 Oktober 2025
4.	ZAINURI, S.H.	Hakim Tinggi	01 November 2025
5.	SUPRAN, S.H.	Panitera Pengganti	01 Desember 2025

Tabel 34. Pensiun di Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Jumlah Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Pensiun di Tahun 2025
1.	Pengadilan Negeri Bengkulu	0
2.	Pengadilan Negeri Curup	1
3.	Pengadilan Negeri Manna	1
4.	Pengadilan Negeri Argamakmur	0
5.	Pengadilan Negeri Bintuhan	0
6.	Pengadilan Negeri Tais	0
7.	Pengadilan Negeri Tubei	0
8.	Pengadilan Negeri Kepahiang	0
9.	Pengadilan Negeri Mukomuko	0
Jumlah		2

D. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia teknis dan nonteknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan sebagai bagian dari kebijakan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan tersebut berlandaskan pada prinsip profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas aparatur peradilan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pedoman pendidikan dan pelatihan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan kewajiban institusional yang harus direncanakan secara sistematis. Setiap hakim dan aparatur peradilan didorong untuk mengikuti program peningkatan kapasitas sesuai standar kompetensi jabatan masing-masing. Diklat teknis difokuskan pada penguatan substansi hukum, hukum acara, serta peningkatan kualitas penanganan perkara. Sementara itu, Diklat nonteknis mencakup penguatan manajemen peradilan, administrasi perkara, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Program manajemen dan kepemimpinan diselenggarakan untuk membentuk pejabat yang adaptif terhadap perubahan dan mampu mengambil keputusan strategis. Kebijakan ini juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen aparatur sipil negara yang mewajibkan pengembangan kompetensi secara berkala. Implementasi diklat dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Berikut rincian jumlah hakim dan pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Manajemen Kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 35. Jumlah Mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis

No	Satuan Kerja	Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis	Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Non Teknis
1.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	0	0
2.	Pengadilan Negeri Bengkulu	18	4
3.	Pengadilan Negeri Curup	1	2
4.	Pengadilan Negeri Manna	7	7
5.	Pengadilan Negeri Argamakmur	46	0
6.	Pengadilan Negeri Bintuhan	3	7
7.	Pengadilan Negeri Tais	4	3
8.	Pengadilan Negeri Tubei	8	0
9.	Pengadilan Negeri Kepahiang	9	0
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	6	14
Jumlah		102	37



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- A. Pengelolaan Keuangan
- B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- C. Pengelolaan Teknologi Informasi

**ZONA
INTEGRITAS**



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dilaksanakan berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). DIPA 01 digunakan untuk membiayai program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang mencakup belanja pegawai, belanja barang operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta administrasi peradilan. DIPA 03 dialokasikan untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana aparat peradilan, termasuk pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan fasilitas penunjang layanan. Selain itu, PNBP pada satuan kerja peradilan berasal dari penerimaan layanan perkara dan biaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang disetor ke kas negara dan dikelola secara tertib, transparan, serta akuntabel. Keseluruhan pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan sesuai regulasi keuangan negara dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Berikut Rincian Realisasi Anggaran DIPA 01, DIPA 03 dan PNPB pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025.

1. REALISASI DIPA 01

Tabel 36. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
				Rp	%	Rp	%
1.	PT Bengkulu	Belanja Pegawai	20.956.099.000,00	20.554.810.637,00	98,09	401.288.363,00	1,91
		Belanja Barang	2.711.070.000,00	2.683.139.146,00	98,97	27.930.854,00	1,03
		Belanja Modal	0,00	0,00	0	0,00	0
		Total	23.667.169.000,00	23.237.949.783,00	98,19%	429.219.217,00	1,81
2.	PN Bengkulu	Belanja Pegawai	12.145.384.000,00	12.084.325.059,00	99,50	61.058.941,00	0,50
		Belanja Barang	2.119.007.000,00	2.116.609.505,00	99,89	2.397.495,00	0,11
		Belanja Modal	249.500.000,00	249.492.120,00	99,99	7.880,00	0,001
		Total	14.513.891.000,00	14.450.426.684,00	99,56	63.464.316	0,44
3.	PN Curup	Belanja Pegawai	5.116.269.000,00	5.042.199.438,00	98,00	74.069.562,00	1,45
		Belanja Barang	1.230.199.000,00	1.229.272.624,00	99,92	926.376,00	0,08
		Belanja Modal	283.800.000,00	283.750.000,00	99,98	50.000,00	0,02
		Total	6.630.268.000,00	6.555.222.062,00	98,87	75.045.938,00	1,13
4.	PN Manna	Belanja Pegawai	4.022.765.000,00	4.005.341.939,00	99,57	17.423.601,00	0,43
		Belanja Barang	1.131.824.000,00	1.124.234.951,00	99,33	7.592.049,00	0,67
		Belanja Modal	55.000.000,00	54.320.000,00	98,76	680.000,00	1,24
		Total	5.209.589.000,00	5.183.896.890,00	99,50	25.695.650,00	0,49

No	Satuan Kerja	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
				Rp	%	Rp	%
5.	PN Argamakmur	Belanja Pegawai	4.129.813.000,00	4.105.830.692,00	99,42	23.982.308,00	0,58
		Belanja Barang	1.434.341.000,00	1.433.134.361,00	99,92	1.206.639,00	0,08
		Belanja Modal	0,00	0,00	0	0,00	0
		Total	5.564.154.000,00	5.538.965.053,00	99,55	25.188.947	0,45
6.	PN Bintuhan	Belanja Pegawai	3.441.893.000,00	3.379.075.497,00	99,43	19.585.503,00	0,57
		Belanja Barang	1.049.812.000,00	844.034.667,00	96,87	32.893.354,00	0,13
		Belanja Modal	456.839.000,00	436.000.410,00	95,44	20.838.590,00	4,66
		Total	4.949.544.000,00	4.876.226.553,00	98,52	73.317.447,00	1,48
7.	PN Tais	Belanja Pegawai	4.400.000.000,00	4.238.647.979,00	96,33	161.352.021,00	3,66
		Belanja Barang	1.187.270.000,00	1.165.698.903,00	98,18	21.571.097,00	1,81
		Belanja Modal	533.510.000,00	495.448.999,00	92,87	38.061.001,00	7,13
		Total	6.120.780.000,00	5.899.795.881,00	95,79	220.984.119,00	3,61
8.	PN Tubei	Belanja Pegawai	3.463.668.000,00	3.416.361.205,00	98,63	47.306.795,00	1,37
		Belanja Barang	1.046.105.000,00	1.033.266.163,00	98,77	12.838.837,00	1,23
		Belanja Modal	0,00	0,00	0	0,00	0
		Total	4.509.773.000,00	4.449.627.368,00	98,67	60.145.632,00	1,33
9.	PN Kepahiang	Belanja Pegawai	4.032.587.000,00	4.018.624.221,00	99,65	13.962.779,00	0,35
		Belanja Barang	1.098.905.000,00	1.092.557.947,00	99,42	6.347.053,00	0,58
		Belanja Modal	516.510.000,00	468.700.000,00	90,74	47.810.000,00	9,26
		Total	5.580.882.168,00	5.453.909.409,00	98,79	126.972.759,00	1,21
10.	PN Mukomuko	Belanja Pegawai	3.351.154.000,00	3.326.007.853,00	99,25	25.146.147,00	0,75
		Belanja Barang	1.013.753.000,00	1.012.422.379,00	99,87	1.330.621,00	0,13
		Belanja Modal	0,00	0,00	0	0,00	0
		Total	4.364.907.000,00	4.338.430.232,00	99,39	26.476.768,00	0,61

2. REALISASI DIPA 03

Tabel 37. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran	%
1.	PT Bengkulu	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	159.494.000,00	156.809.500,00	98,32	2.684.500,00	1,68
2.	PN Bengkulu	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	382.642.000,00	377.029.800,00	98,53	5.612.200,00	1,47
3.	PN Curup	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	90.407.000,00	90.188.100,00	99,76	218.900,00	0,24
4.	PN Manna	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	57.303.000,00	56.993.000,00	99,45	310.000,00	0,54
5.	PN Argamakmur	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	156.775.000,00	155.959.100,00	99,48	815.900,00	0,52
6.	PN Bintuhan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	70.985.000,00	70.034.676,00	98,66	950.324,00	1,44
7.	PN Tais	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	77.341.000,00	77.211.000,00	99,83	130.000,00	0,16
8.	PN Tubei	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	56.859.000,00	56.728.500,00	99,77	130.500,00	0,23
9.	PN Kepahiang	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	105.284.000,00	104.118.600,00	98,89	1.165.400,00	1,11
10.	PN Mukomuko	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	81.862.000,00	81.757.900,00	99,87	104.100,00	0,13

3. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Berikut rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 38. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Kode Akun							
		425122	425131	425151	425232	425233	425239	425911	425912
1.	PT Bengkulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PN Bengkulu	0,00	762.600,00	0,00	0,00	9.330.000,00	32.342.000,00	314.250,00	0,00
3.	PN Curup	2.080.000,00	3.211.650,00	27.140.000,00	4.370.000,00	6.140.000,00	12.722.000,00	0,00	0,00
4.	PN Manna	0,00	0,00	22.961.532,00	430.000,00	1.320.000,00	3.268.000,00	0,00	0,00
5.	PN Argamakmur	0,00	0,00	24.261.512,00	1.570.000,00	3.140.000,00	12.567.500,00	0,00	0,00
6.	PN Bintuhan	0,00	0,00	0,00	490.000,00	550.000,00	3.071.000,00	0,00	0,00
7.	PN Tais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	940.000,00	7.125.450,00	0,00	0,00
8.	PN Tubei	0,00	1.465.000,00	1.608.045,00	300.000,00	320.000,00	1.882.500,00	370.000,00	370.000,00
9.	PN Kepahiang	0,00	1.250.000,00	0,00	790.000,00	1.490.000,00	5.154.000,00	0,00	0,00
10.	PN Mukomuko	0,00	2.101.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	5.351.500,00	0,00	0,00
Jumlah		2.080.000,00	8.790.250,00	75.971.089,00	7.960.000,00	25.350.000,00	83.483.950,00	684.250,00	370.000,00

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASANA

Pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2025 meliputi tanah dan bangunan, kendaraan dinas, mesin TIK, mesin non TIK dan prasarana lainnya.

1. TANAH

Penertiban administrasi dan pengamanan Barang Milik Negara (BMN) terus dilakukan melalui inventarisasi serta verifikasi legalitas aset, khususnya tanah yang wajib tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah ini meliputi penyesuaian data aset dan konversi sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik guna menjamin kepastian hukum, keamanan dokumen, dan akurasi pencatatan. Berikut Daftar Tanah pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 39. Daftar Tanah Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Total
1.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	6	0	6
2.	Pengadilan Negeri Bengkulu	9	0	9
3.	Pengadilan Negeri Curup	7	0	7
4.	Pengadilan Negeri Manna	5	0	5
5.	Pengadilan Negeri Argamakmur	6	0	6
6.	Pengadilan Negeri Bintuhan	3	0	3
7.	Pengadilan Negeri Tais	1	0	1
8.	Pengadilan Negeri Tubei	4	0	4
9.	Pengadilan Negeri Kepahiang	4	0	4
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	2	0	2

2. TANAH DAN GEDUNG

Penetapan Status Penggunaan BMN adalah suatu bentuk Surat Keputusan dari Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan pendelegasian sebagian kewenangan untuk menetapkan kewenangan penggunaan BMN yang berada dan menjadi tanggung jawab Satuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN merupakan administrasi yang melekat pada materil BMN itu sendiri sehingga harus dimiliki oleh setiap BMN yang sesuai ketentuan untuk menghindari duplikasi, kehilangan arsip data serta terjaminnya kepastian hukum BMN itu sendiri. Berikut rincian tanah dan gedung Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah sudah dan atau belum PSP pada Tahun 2025

Tabel 40. Daftar PSP Tanah dan Gedung Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Nama Aset	Sudah PSP		Belum PSP	
			Luas (M ²)	Nilai (Rp)	Luas (M ²)	Nilai (Rp)
1.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1195	491.231.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2010	904.886.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1933	4.745.422.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	586	1.480.378.000	-	-
		Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	8958	20.710.896.000	-	-
		Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1015	1.152.178.000	-	-
		Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	81	107.000.000	-	-
		Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tingkat Banding	1900	7.330.680.219	-	-
		Bangunan Terbuka Lainnya	493	171.600.000	-	-
		Bangunan Terbuka Lainnya	35	49.105.000	-	-
		Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	100	84.323.000	-	-
		Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	200	624.201.000	-	-
		Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	200	482.106.000	-	-
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	100	185.074.000	-	-
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	100	208.755.000	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	100	255.724.000	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	100	176.234.000	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	100	197.225.000	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	100	186.500.000	-	-
2.	Pengadilan Negeri Bengkulu	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4000	13.580.064.000	-	-
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4040	3.451.776.000	-	-
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2500	1.000.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1190	2.907.080.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	711	664.981.000	-	-

No	Satuan Kerja	Nama Aset	Sudah PSP		Belum PSP	
			Luas (M ²)	Nilai (Rp)	Luas (M ²)	Nilai (Rp)
		Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	675	1.406.797.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	1124	1.138.387.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	1498	1.263.913.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	961	2.407.983.000	-	-
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1110	7.178.672.000	-	-
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	2358	38.685.967.377	-	-
		Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	130	338.853.326	-	-
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	100	349.666.357	-	-
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	241.213.000	-	-
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	129.552.000	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	206.581.638	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	205.290.060	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	205.737.781	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	173.145.185	-	-
3.	Pengadilan Negeri Curup	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	900	446.130.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2.398	1.296.359.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	749	430.450.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	900	305.325.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	400	128.929.000	-	-
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.586	2.002.781.000	-	-
		Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1.000	163.286.000	-	-
		Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	9.206	10.006.001.000	-	-
4.	Pengadilan Negeri Manna	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	582	622.078.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	658	478.131.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.496	1.547.687.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2.700	3.381.210.000	-	-
5.	Pengadilan Negeri Argamakmur	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	7.620	3.080.957.000	-	-
		Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	2.393	655.637.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2.500	1.124.156.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4.994	1.966.949.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.106	176.146.000	-	-

No	Satuan Kerja	Nama Aset	Sudah PSP		Belum PSP	
			Luas (M ²)	Nilai (Rp)	Luas (M ²)	Nilai (Rp)
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	592	111.931.000	-	-
		Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	36	69.496.000	-	-
		Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaatz	300	413.539.000	-	-
		Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II	1.667	4.723.907.000	-	-
		Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II	160	312.969.000	-	-
		Pagar Permanen	284	346.391.000	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	240	238.377.378	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	171	244.433.922	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	106	216.252.922	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	106	306.955.922	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	106	216.252.922	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	106	273.966.922	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	103	216.252.922	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	103	189.490.922	-	-
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	109	183.435.922	-	-
6.	Pengadilan Negeri Bintuhan	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	42.308	5.793.154.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4.800	119.587.488	-	-
		Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II	1.500	4.694.186.000	-	-
		Gedung Pos Jaga Permanen	9	15.755.000	-	-
		Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	15	49.950.000	-	-
		Bangunan Gudang Tertutup Permanen	72	328.395.000	-	-
		Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	100	85.446.000	-	-
7.	Pengadilan Negeri Tais	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	10.485	2.113.133.000	-	-
		Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II	1.717	4.984.409.100	-	-
		Gedung Pos Jaga Permanen	20	32.028.000	-	-
		Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	6	168.464.000	-	-
		Pagar Permanen	300	320.421.000	-	-
8.	Pengadilan Negeri Tubei	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.588	4.604.437.000,00	-	-
		Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	45	288.663.200,00	-	-
		Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	50	407.417.000,00	-	-
		Mess/Wisma/Bungalow Tempat Istirahat	187	562.133.000,00	-	-
9.	Pengadilan Negeri Kepahiang	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1.000	272.940.000	-	-

No	Satuan Kerja	Nama Aset	Sudah PSP		Belum PSP	
			Luas (M ²)	Nilai (Rp)	Luas (M ²)	Nilai (Rp)
		Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	9.650	1.281.520.000	-	-
		Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	428	88.665.764	-	-
		Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.571	325.453.073	-	-
		Bangunan Gedung Tertutup Permanen	72	107.303.575	-	-
		Bangunan Gedung Intalasi Lainnya	12	41.949.600	-	-
		Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	30	173.799.900	-	-
		Gedung Pos Jaga Permanen	14	17.088.000	-	-
		Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II	1.400	3.491.386.085	-	-
		Bangunan Gedung Arsip Permanen	70	266.083.300	-	-
		Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	288	364.066.183	-	-
		Pagar Permanen	565	586.384.269	-	-
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	7.095	807.924.210	-	-
		Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	2.000	655.637.000	-	-
		Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II	2.496	20.495.850.288	-	-
		Pagar Permanen	493	1.978.869.653	-	-
		Bangunan Rumah Genset	21	125.102.888	-	-
		Gedung Pos Jaga Permanen	22	76.437.830	-	-

3. KENDARAAN DINAS

Berikut jumlah Penetapan Status Penggunaan (PSP) kendaraan dinas pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025, baik yang telah ditetapkan maupun yang masih dalam proses penetapan. Data ini menggambarkan kondisi administrasi pengelolaan kendaraan dinas sebagai bagian dari tertib pengelolaan Barang Milik Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 41. Daftar PSP Kendaraan Dinas Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Kendaraan Roda 4	5	5	0
		Kendaraan Roda 2	10	0	0
2.	Pengadilan Negeri Bengkulu	Kendaraan Roda 4	7	6	1
		Kendaraan Roda 2	0	0	0
3.	Pengadilan Negeri Curup	Kendaraan Roda 4	3	3	0
		Kendaraan Roda 2	6	6	0
4.	Pengadilan Negeri Manna	Kendaraan Roda 4	3	3	0
		Kendaraan Roda 2	3	3	0

No	Satuan Kerja	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
5.	Pengadilan Negeri Argamakmur	Kendaraan Roda 4	3	3	0
		Kendaraan Roda 2	10	10	0
6.	Pengadilan Negeri Bintuhan	Kendaraan Roda 4	2	1	1
		Kendaraan Roda 2	4	4	0
7.	Pengadilan Negeri Tais	Kendaraan Roda 4	2	1	1
		Kendaraan Roda 2	4	4	0
8.	Pengadilan Negeri Tubei	Kendaraan Roda 4	0	0	0
		Kendaraan Roda 2	0	0	0
9.	Pengadilan Negeri Kepahiang	Kendaraan Roda 4	2	2	0
		Kendaraan Roda 2	4	4	0
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	Kendaraan Roda 4	3	3	0
		Kendaraan Roda 2	2	2	0

4. MESIN TIK

Berikut jumlah Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas mesin Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya Tahun 2025. Penetapan ini merupakan bagian dari tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara guna memastikan setiap aset TIK tercatat, digunakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PSP juga menjadi dasar legal dalam pemanfaatan barang untuk mendukung operasional peradilan dan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Tabel 42. Daftar PSP Mesin TIK Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Jumlah (Unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	106	106	0
2.	Pengadilan Negeri Bengkulu	8	8	0
3.	Pengadilan Negeri Curup	118	118	0
4.	Pengadilan Negeri Manna	75	68	7
5.	Pengadilan Negeri Argamakmur	88	88	0
6.	Pengadilan Negeri Bintuhan	81	73	8
7.	Pengadilan Negeri Tais	72	71	1
8.	Pengadilan Negeri Tubei	1	1	0
9.	Pengadilan Negeri Kepahiang	95	95	0
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	88	88	0

5. MESIN NON TIK

Berikut rincian jumlah Penetapan Status Penggunaan (PSP) Mesin Non TIK pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 43. Daftar PSP Mesin Non TIK Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Jumlah (Unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	980	980	0
2.	Pengadilan Negeri Bengkulu	131	131	0
3.	Pengadilan Negeri Curup	640	640	0
4.	Pengadilan Negeri Manna	338	338	0
5.	Pengadilan Negeri Argamakmur	673	671	2
6.	Pengadilan Negeri Bintuhan	456	448	8
7.	Pengadilan Negeri Tais	446	422	24
8.	Pengadilan Negeri Tubei	3	3	0
9.	Pengadilan Negeri Kepahiang	314	314	0
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	573	571	2

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E-COURT

E-Court merupakan layanan peradilan berbasis elektronik yang diperuntukkan bagi Pengguna Terdaftar, meliputi pendaftaran perkara secara daring, perhitungan dan pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik, pemanggilan melalui saluran elektronik, serta pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*). Implementasi sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat. Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Bengkulu bersama 9 (sembilan) Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya telah sepenuhnya menerapkan layanan *E-Court* dalam proses administrasi dan penanganan perkara. Adapun jumlah perkara yang didaftarkan melalui *E-Court* pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 44. Implementasi E-Court Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Pendaftaran (Dibayar)	Berhasil Nomor Perkara	Perkara Gugatan	Perkaran Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan
1.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	49	49	49	0	0	0
2.	Pengadilan Negeri Bengkulu	238	240	94	19	2	0
3.	Pengadilan Negeri Curup	200	200	6	6	0	188
4.	Pengadilan Negeri Manna	44	44	6	5	0	33
5.	Pengadilan Negeri Argamakmur	60	60	35	1	1	9
6.	Pengadilan Negeri Bintuhan	19	17	4	0	0	11
7.	Pengadilan Negeri Tais	40	40	9	3	0	28
8.	Pengadilan Negeri Tubei	9	9	7	0	0	2
9.	Pengadilan Negeri Kepahiang	58	58	11	5	1	41
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	64	64	22	4	-	38

2. IMPLEMENTASI SIPP

Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengimplementasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai sarana utama dalam pengelolaan administrasi, pemantauan proses persidangan, serta pelaporan penanganan perkara secara elektronik. Penilaian terhadap implementasi SIPP dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan, kelengkapan, dan konsistensi penginputan data pada masing-masing satuan kerja. Hasil evaluasi implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 disajikan pada Tabel 45 berikut.

Tabel 45. Implementasi Penilaian SIPP Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Type/ Kelas	Jumlah Perkara	Penilaian SIPP				
				Kinerja	Kepatuhan	Kelengkapan	Kesesuaian	Total
1.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Type B	445					
2.	Pengadilan Negeri Bengkulu	Kelas IA	500-1000	95.36%	97.85%	99.25%	98.46%	97,73%
3.	Pengadilan Negeri Curup	Kelas IB	1-500	100%	96,72%	85%	99,67%	95,35%
4.	Pengadilan Negeri Manna	Kelas II	1~500	96.15%	99.52%	100%	99.91%	98.9%
5.	Pengadilan Negeri Argamakmur	Kelas II	321	96,30%	95,90%	95,24%	99,93%	96,84%
6.	Pengadilan Negeri Bintuhan	Kelas II	1-500	95.5%	97.31%	100%	99.42%	98.06%
7.	Pengadilan Negeri Tais	Kelas II	1-500	96.3%	98.48%	98.97%	98.75%	98.11%
8.	Pengadilan Negeri Tubei	Kelas II	786	96,92%	91,92%	99,66%	98,43%	96,73%
9.	Pengadilan Negeri Kepahiang	Kelas II	1-500	96,67%	98,57%	99,31%	98,10%	98,16%
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	Kelas II	146	94,67%	98,14%	90,41%	99,30%	95,63%



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani bangsa



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- A. Akreditasi Penjamin Mutu
- B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- C. Inovasi Pelayanan Publik



ZONA
INTEGRITAS



No	Satuan Kerja	Jumlah Inovasi	Inovasi
			2. SIMPONI ARMA (Sistem Informasi PTSP Online Arga Makmur), Menjawab berbagai problematika yang ada, maka Pengadilan Negeri Arga Makmur menggagas adanya terobosan atau inovasi yang memungkinkan para pencari keadilan untuk berkomunikasi langsung tatap muka dengan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Arga Makmur yang diberi nama SIMPONI ARMA (Sistem Informasi PTSP Online Arga Makmur). Hal ini selaras dengan Mahkamah Agung yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mewujudkan pelayanan prima bagi para pencari keadilan. Dalam inovasi bertajuk SIMPONI ARMA (Sistem Informasi PTSP Online Arga Makmur) ini, para pencari keadilan dapat memilih berinteraksi dengan petugas melalui aplikasi Whatsapp ataupun Zoom, serta memungkinkan untuk face to face sehingga apa yang menjadi pertanyaan dari para pencari keadilan dapat dituntas dalam sesi pelayanan virtual. 3. SISUPER MAKMUR (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik Untuk Masyarakat Kaum Rentan). Pengadilan Negeri Arga Makmur telah memiliki fasilitas dalam pengisian survei yaitu berupa Digital Podium sebagai alat/mesin untuk mengisi survei. Namun, fasilitas ini masih sangat kurang dan perlu untuk dioptimalisasi dan beberapa pelayanan terkhusus pelayanan kepada kaum rentan (lansia, ibu hamil, dan menggunakan kursi roda) dimana pada Pengadilan Negeri Arga Makmur belum ada fasilitas pengisian survei untuk kaum rentan (lansia, ibu hamil, dan menggunakan kursi roda) sehingga perlu diadakan penambahan fasilitas dan pelayanan agar mempermudah kaum rentan. Dengan adanya Inovasi SISUPER MAKMUR diharapkan Pengadilan Negeri Arga Makmur bisa memberikan pelayanan prima bukan hanya masyarakat biasa yang merasakannya akan tetapi juga kelompok rentan terkhususnya ibu hamil, lansia, dan yang menggunakan kursi roda. dengan diberikan perlakuan khusus dan kemudahan kepada kelompok rentan (ibu hamil, lansia, dan yang menggunakan kursi roda) dalam memberikan penilaian pelayanan kepada Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagai tolak ukur Pelayanan melalui Pengisian Survei. Inovasi ini menggunakan QR Barcode untuk penggunaannya, sehingga pencari layanan dapat memberikan penilaian melalui smartphonanya atau kualitas layanan yang diberikan. 4. SUTING TRIPING (Sudut Penting tempat istirahat Saksi dan Pengunjung yang ingin berbaring). Inovasi ini timbul dari beberapa masyarakat yang datang dari jauh, dan membutuhkan ruangan untuk tempat beristirahat. Maka dari Pengadilan Negeri Arga Makmur menyediakan satu ruangan khusus yang dapat di pergunakan masyarakat sebagai tempat untuk beristirahat untuk menunggu dimulainya persidangan. Dengan adanya inovasi ini diharapkan masyarakat akan merasa terbantu dan terlayani oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dan pada saat persidangan dalam keadaan Prima. 5. TERAS KEADILAN. Pengadilan Negeri Arga Makmur menyediakan tempat tunggu pengunjung yang didesain modern dan nyaman di area terbuka sekaligus untuk area merokok bagi pengunjung.
6.	Pengadilan Negeri Bintuhan	-	-
7.	Pengadilan Negeri Tais	4	FORSIFERA, INFORA, ELSINTA, POREFER
8.	Pengadilan Negeri Tubei	-	-
9.	Pengadilan Negeri Kepahiang	7	SIDANG KELILING, DILAN JOS, POD CASH PN KEPAHANG, ADEK DEO, DARAMODIS, POSBAKU ONLINE, SIKEPENG
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	2	POJOK LOKAN (Pojok Lokasi Peminjaman Pakaian Sidang), KOTAK ANTIK, (Kotak Kesadaran Kode Etik)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani bangsa



BAB VI PENGAWASAN

A. Internal
B. Evaluasi



ZONA
INTEGRITAS



BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah pengawasan melekat dimana serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan internal dilingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu meliputi Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, pengawasan pembinaan bidang-bidang pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan menindak lanjuti pengaduan yang ada.

1. PENGAWASAN DAERAH

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu secara resmi menetapkan Surat Keputusan Nomor: 3054/KPT.W8.U/SK.PW1.3/XII/2025 perihal Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah sebagai manifestasi nyata dari komitmen penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas pelayanan yudisial di seluruh satuan kerja Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Melalui ketetapan strategis ini, Hakim Tinggi Pengawas Daerah diberikan mandat penuh serta otoritas kedinasan untuk menyelenggarakan pembinaan teknis maupun administratif, melakukan evaluasi kinerja secara komprehensif, serta menjamin seluruh jalannya peradilan telah terakomodasi sesuai dengan standar integritas dan regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia."

- Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan perkara dan hasil evaluasi pengawasan tahun sebelumnya baik teknis maupun administrasi peradilan, untuk mengecek tindak lanjutnya.
- Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan dokumen, laporan pembinaan dan pengawasan.
- Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan Pengadilan Tinggi Bengkulu sekali beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan.

Adapun hasil pengawasan daerah pada tahun 2025 secara umum adalah sebagai berikut:

- Pada umumnya administrasi dan penyelenggaraan peradilan baik bidang teknis maupun kesekretariatan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- Kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya pegawai pada setiap satuan kerja sehingga banyak formasi jabatan yang kosong.
- Kendala lain adalah kondisi sarana dan prasarana yang masih banyak pembaruan dan pengadaan.

Rincian pengawasan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dijelaskan pada Tabel 49 Pengawasan Daerah Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Tabel 49. Pengawasan Daerah Tahun 2025

No	Nama Kegiatan Pengawasan	Subjek Pengawasan	Objek Yang Diawasi	Tanggal	Tempat	Kesimpulan
1.	Pengawasan Reguler Semester I	Pengawasan Teknis Administrasi dan Yustisial	Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum dan Pelayanan Publik	14–16 Mei 2025	PN Manna dan PN Bintuhan	Tupoksi telah dilaksanakan dengan baik. Ditemukan beberapa kekurangan administratif yang bersifat teknis dan telah diberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan.
2.	Pengawasan Reguler	Pengawasan Teknis Administrasi dan Yustisial	Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara dan Pelayanan Publik	19 Mei 2025	PN Tais	Administrasi perkara dan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan. Perlu peningkatan konsistensi penerapan SOP dan tertib administrasi.
3.	Pengawasan Reguler	Pengawasan Teknis Administrasi dan Yustisial	Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Umum dan Pelayanan Publik	21–23 Mei 2025	PN Mukomuko	Secara umum pelaksanaan tugas berjalan baik dan tertib. Beberapa aspek administrasi perlu penyempurnaan dan penguatan pengawasan internal.
4.	Pengawasan Reguler	Pengawasan Teknis Administrasi dan Yustisial	Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Administrasi Umum	26–28 Mei 2025	PN Arga Makmur dan PN Tubei	Manajemen perkara telah berjalan sesuai standar. Diperlukan peningkatan monitoring dan evaluasi berkala untuk menjaga kualitas kinerja.
5.	Pengawasan Reguler Semester I	Pengawasan Teknis Administrasi dan Yustisial	Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelayanan Publik	16–18 Juni 2025	PN Curup dan PN Kepahiang	Penyelenggaraan peradilan telah berjalan baik. Terdapat beberapa catatan administratif yang perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan efektivitas pelayanan.
6.	Pengawasan Reguler	Pengawasan Teknis Administrasi dan Yustisial	Manajemen Peradilan dan Disiplin Kerja	25 Juni 2025	PN Bengkulu	Disiplin kerja dan administrasi perkara telah memenuhi standar. Direkomendasikan evaluasi dan monitoring berkelanjutan.
7.	Pengawasan Reguler Semester II	Pengawasan Teknis Administrasi dan Yustisial	Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara dan Pelayanan Publik	10 November 2025	PN Bengkulu	Pelaksanaan tugas berjalan baik. Perlu penguatan pengendalian internal dan optimalisasi administrasi berbasis elektronik.
8.	Pengawasan Reguler Semester II	Pengawasan Teknis Administrasi dan Yustisial	Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara dan Administrasi Umum	24 November 2025	PN Arga Makmur	Administrasi dan pelayanan publik telah sesuai ketentuan. Diperlukan peningkatan konsistensi pelaporan dan monitoring internal.

2. PENGAWASAN SIDANG

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Bengkulu tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas dan atau Pembina Bidang-Bidang Pengadilan Tinggi Bengkulu. Hakim Tinggi yang ditunjuk diberikan mandat dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bidang-bidang tertentu, baik yang berkaitan dengan aspek teknis yudisial maupun administrasi peradilan. Penugasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, serta kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang sebagai berikut:

a. Bidang Teknis

- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan teknis dan administratif dalam proses penyelesaian perkara banding pada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar operasional prosedur yang berlaku.
- Melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan terhadap tata cara serta prosedur penerimaan perkara banding, termasuk kelengkapan berkas dan ketertiban administrasinya, sebagai bagian dari upaya menjamin tertib administrasi peradilan.
- Mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi register perkara banding agar dilakukan secara akurat, tertib, dan akuntabel sesuai dengan pedoman administrasi peradilan yang berlaku.
- Memantau dan menelaah pelaksanaan administrasi pelaporan perkara banding guna memastikan ketepatan, konsistensi, dan keandalan data yang disampaikan dalam sistem pelaporan perkara.
- Mengawasi penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara banding untuk menjamin tertib dokumentasi, keamanan arsip, serta kemudahan akses terhadap dokumen perkara sesuai prinsip pengelolaan arsip peradilan.
- Memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis kepada aparatur peradilan dalam rangka pembinaan dan pengendalian administrasi perkara, sehingga tercipta standar kerja yang seragam dan profesional.
- Menginventarisasi setiap temuan atau permasalahan, baik yang bersifat teknis yudisial maupun administratif, kemudian menyusun laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu disertai analisis serta rekomendasi tindak lanjut sebagai langkah perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja peradilan.

b. Bidang Kesekretariatan

- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan administrasi umum guna memastikan tertib administrasi dan efektivitas kinerja organisasi.
- Melakukan pengawasan terhadap tingkat kedisiplinan aparatur kesekretariatan, termasuk kepatuhan terhadap jam kerja, tata tertib, serta ketentuan kepegawaian yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- Mengawasi pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi data kepegawaian, penilaian kinerja, cuti, dan pengembangan kompetensi pegawai agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memantau pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran pada bagian kesekretariatan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan anggaran.
- Mengawasi pengelolaan barang milik negara (BMN), sarana dan prasarana kantor, serta pemeliharaannya agar dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan kesekretariatan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan dan prinsip tata kelola yang baik.
- Memberikan arahan dan pembinaan kepada pejabat struktural dan pelaksana di bidang kesekretariatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan mendukung kelancaran tugas peradilan.
- Menginventarisasi temuan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan serta menyusun laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu disertai rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang diperlukan.



Adapun hasil Pengawasan Sidang pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 secara umum sebagai berikut:

- a. Pola Bindalmin telah berjalan sesuai ketentuan dalam buku Pola Bindalmin, namun masih terdapat kurang ketelitian dalam melaksanakan tugas.
- b. Penerapan hukum acara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu secara substansi sudah baik.
- c. Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan terlaksana dengan baik.
- d. Pelaksanaan teknis persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.
- e. Penyusunan surat-surat yang terdapat pada Bundel B dan dalam berkas perkara tingkat banding secara umum lebih terlaksana dengan baik.
- f. Penyelesaian minutasasi berkas-berkas perkara banding, baik di Bagian Kepaniteraan Pidana, Perdata maupun di Kepaniteraan Hukum telah berjalan baik.
- g. Pengawasan disiplin Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah baik, namun perlu ditingkatkan kinerja yang lebih baik dan profesional.
- h. Pembukuan Keuangan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya sudah sesuai peraturan.
- i. Sistem administrasi perlengkapan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN sudah berjalan dengan baik.
- j. Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan baik.
- k. Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi.
- l. Pengembangan Teknologi dan Informasi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah berjalan baik.

3. PENANGANAN PENGADUAN

Untuk Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menerima adanya pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dan tidak ada tindak lanjut terhadap penanganan pengaduan selama tahun 2025. Tabel 50 tentang penanganan pengaduan untuk tahun 2025 dapat dikatakan nihil atau tidak adanya tindak lanjut terhadap penanganan pengaduan.

Tabel 50. Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No	Bulan	Tanggal Masuk/ Nomor Pengaduan	Pelapor	Keterangan
1.	NIHIL			

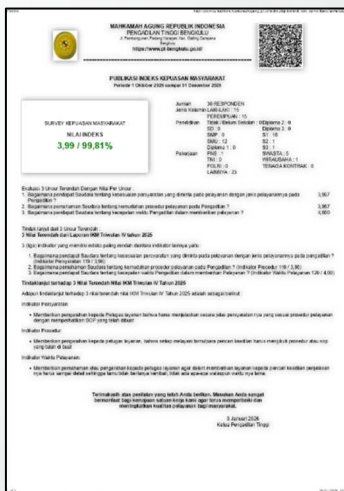
B. EVALUASI

Pada tahun 2025, pelaksanaan pengawasan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan 9 (sembilan) satuan kerja di wilayah hukumnya dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berbasis evaluasi kinerja sebagai bagian dari penguatan fungsi pengendalian internal. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan. Pendekatan ini menempatkan pengawasan sebagai instrumen pembinaan yang konstruktif guna mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja.

Kegiatan pengawasan dan pembinaan dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan semester, serta secara insidental sesuai kebutuhan organisasi. Ruang lingkup pengawasan meliputi administrasi perkara, manajemen perkantoran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, serta kualitas pelayanan publik. Penyusunan dan penandatanganan kontrak kinerja menjadi bagian integral dari sistem akuntabilitas, yang memuat indikator kinerja, target capaian, dan komitmen peningkatan mutu layanan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh temuan hasil pengawasan serta kewajiban dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti secara tepat waktu, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi pelayanan peradilan pada tahun 2025 juga dilaksanakan melalui instrumen survei elektronik yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

1. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

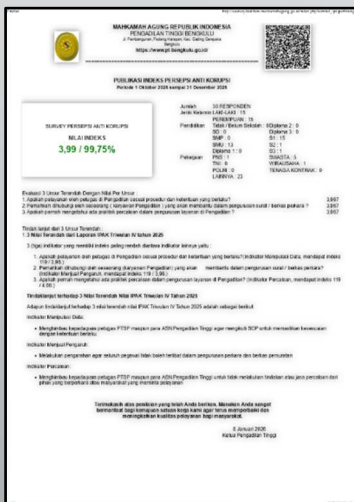


Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pengukuran dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Survey Badilum sehingga proses pengisian berlangsung objektif, transparan, dan terdokumentasi secara sistematis. Berdasarkan hasil pengolahan data Triwulan IV Tahun 2025, diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 4,00 atau setara dengan 100,00 persen, yang termasuk dalam kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”. Nilai tersebut diperoleh dari 30 responden yang terdiri atas 17 laki-laki dan 13 perempuan, yang memberikan penilaian terhadap berbagai unsur pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Penilaian dalam SKM mencakup beberapa komponen utama, antara lain kejelasan persyaratan layanan, kemudahan prosedur, ketepatan waktu penyelesaian, kompetensi dan sikap petugas, kewajaran biaya, kualitas sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat menilai prosedur layanan telah disampaikan

secara jelas dan mudah dipahami, sehingga meminimalkan potensi kesalahan atau ketidakpastian dalam proses administrasi. Kompetensi dan profesionalitas petugas juga dinilai sangat baik, tercermin dari kemampuan memberikan informasi yang akurat, responsif, dan berorientasi pada solusi. Selain itu, aspek kecepatan pelayanan dan kenyamanan fasilitas pendukung memperoleh apresiasi tinggi dari responden, yang menunjukkan adanya peningkatan efektivitas tata kelola layanan. Secara keseluruhan, capaian nilai IKM tersebut merefleksikan tingkat kepuasan publik yang optimal serta menjadi indikator bahwa standar pelayanan yang diterapkan telah berjalan sesuai harapan masyarakat pengguna layanan peradilan.

2. SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)



Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilaksanakan sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pelaksanaan survei dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Survey Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sehingga proses pengisian berlangsung objektif, terdokumentasi, dan meminimalkan intervensi dalam pengumpulan data. Berdasarkan hasil pengolahan data Triwulan IV Tahun 2025, diperoleh Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,99 atau setara dengan 99,68 persen, dengan kategori mutu persepsi “Bersih dari Korupsi”. Nilai tersebut dihimpun dari 31 responden yang terdiri atas 19 laki-laki dan 12 perempuan yang memberikan penilaian terhadap pengalaman mereka selama menerima layanan peradilan.

Penilaian dalam SPAK mencakup beberapa indikator penting, antara lain transparansi prosedur dan biaya, tidak adanya praktik pungutan liar, ketidakberpihakan petugas, pelayanan tanpa diskriminasi, serta ketersediaan mekanisme pengaduan apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Hasil survei

menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak menemukan adanya indikasi gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun permintaan imbalan di luar ketentuan yang berlaku. Prosedur pelayanan dinilai berjalan secara terbuka dan sesuai standar, dengan informasi biaya dan tahapan proses yang disampaikan secara jelas kepada pengguna layanan. Selain itu, sikap profesional dan integritas aparatur memperoleh penilaian sangat baik, mencerminkan komitmen kuat dalam membangun budaya kerja yang bersih dan beretika. Secara keseluruhan, capaian nilai tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan serta menjadi indikator penting dalam memperkuat tata kelola lembaga yang bebas dari praktik korupsi.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani bangsa



BAB VII PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi



ZONA
INTEGRITAS



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2025, Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri dibawahnya telah berusaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta memberikan pelayanan publik dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal ini pembinaan dan pengawasan.



- 
1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
 2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025.
 3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
 4. Seluruh pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah menerapkan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
 5. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah menerapkan aplikasi *E-Court* dan *Elitigasi* dengan fitur *e-filling* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), sehingga pendaftaran gugatan atau permohonan dari seorang advokat ataupun pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan.
 6. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu saat ini berusaha untuk mengimplementasikan Aplikasi *e-BERPADU* untuk memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum, kerja sama antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan atau pendukung pelayanan publik.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2025 Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu masih mengalami kendala, antara lain:

1. Sumber daya manusia, khususnya staf yang ahli dibidang teknologi informasi masih kurang.
2. Sarana dan prasarana gedung dan fasilitas perkantoran masih kurang.
3. Fasilitas rumah dinas Hakim kurang
4. Penggunaan beberapa aplikasi elektronik inovasi masih belum maksimal.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, maka diperlukan:

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

